



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PUPUK OLEH DINAS
PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN
PELALAWAN KEPADA PETANI SAWIT
DI DESA BUKIT JAYA KECAMATAN UKUI**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial
(S.Sos) Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan
Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



OLEH

CITRA AMALIA SYAHIDAH
NIM : 12270521767

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2026/1446 H**



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nama

NIM

Program Studi

Fakultas

Judul

: Citra Amalia Syahidah

: 12270521767

: Administrasi Negara

: Ekonomi dan Ilmu Sosial

: Implementasi Program Bantuan Pupuk Oleh Dinas Perkebunan
Dan Peternakan Kabupaten Pelalawan Kepada Petani Di Desa
Bukit Jaya Kecamatan Ukui

DISETUJUI OLEH:

Dosen Pembimbing

Candra Jon Asnjara, S.Sos., M.Si
NIP.197601042023211001

MENGETAHUI

WAKIL DEKAN 1

Kakulia Ekonomi dan Ilmu Sosial



Dr. Nurhasera, SE, M.Si.

NIP.19730601 200710 2 003

KETUA PROGRAM STUDI
Administrasi Negara

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

© Hak Cipta Ditamini UIN Suska Riau
 Nama :
 NIM :
 Jurusan :
 Fakultas :
 Judul Skripsi :
 Tanggal Ujian :

: Citra Amalia Syahidah
 : 12170521767
 : Administrasi Negara
 : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 : Implementasi Program Bantuan Pupuk Oleh
 Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten
 Pelalawan Kepada Petani Sawit Di Desa Bukit
 Jaya Kecamatan Ukui
 : 23 April 2026

Tim Penguji

Ketua Penguji
Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

Sekretaris
Abdiana Ilosa, S.AP., M.PA
 NIP. 19870716 201503 2 003

Penguji I
Pivit Septiary Chandra, S.Sos., M.Si
 NIP. 19920925 201903 2 021

Penguji II
Candra Jon Asmara, S.Sos., M.Si
 NIP. 19760104 202321 1 001

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Citra Amalia Syahidah

NIM : 12270521767

Tempat/Tgl. Lahir : Pelalawan, 5 Oktober 2009

Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial

Prodi : Administrasi Negara (S1)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Implementasi Program Bantuan Pupuk Oleh Dinas Perkebunan dan
Peternakan Kepada Petani Sawit Di Desa Bukit Jaya
Kecamatan Ukui

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 7 Mei 2026.

Yang membuat pernyataan



Citra Amalia Syahidah

NIM : 12270521767

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PUPUK OLEH DINAS
 PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN
 PELALAWAN KEPADA PETANI SAWIT DI
 DESA BUKIT JAYA KECAMATAN UKUI**

OLEH

CITRA AMALIA SYAHIDAH

NIM : 12270521767

Penelitian ini di latar belakanginya oleh Masih banyak petani yang belum mendapatkan program bantuan pupuk, Masih belum tepat sasarannya program, Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui program ini, Kualitas pupuk yang diberikan masih cenderung tidak baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan hambatan Program Bantuan Pupuk Oleh Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Pelalawan Kepada Petani Sawit Di Desa Bukit Jaya Kecamatan Ukui. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari Saprasi (Sarana dan prasarana), Verval (tim pendamping dan penyuluhan), Petugas Pendamping Desa Bukit Jaya, Kepala Desa Bukit Jaya, Masyarakat penerima bantuan pupuk, dan Masyarakat yang tidak menerima bantuan pupuk. Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Program Bantuan Pupuk Oleh Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Pelalawan Kepada Petani Sawit Di Desa Bukit Jaya Kecamatan Ukui masih ada terdapat beberapa hambatan.

Kata Kunci: Implementasi, Program Bantuan Pupuk, Dan Petani Sawit



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

**IMPLEMENTATION OF THE FERTILIZER ASSISTANCE PROGRAM BY
THE PLANTATION AND LIVESTOCK OFFICE OF PELALAWAN
REGENCY FOR OIL PALM FARMERS IN BUKIT JAYA VILLAGE, UKUI
DISTRICT**

BY

CITRA AMALIA SYAHIDAH
NIM : 12270521767

This research is based on the fact that there are still many farmers who have not received the fertilizer assistance program, the program is still not properly targeted, many people are still unaware of this program, and the quality of the fertilizer provided still tends to be poor. This study aims to determine the implementation and obstacles of the Fertilizer Assistance Program by the Pelalawan Regency Plantation and Livestock Service to Palm Oil Farmers in Bukit Jaya Village, Ukui District. The research method used is descriptive qualitative through interviews, observation, and documentation. Informants consist of Sapras (Facilities and Infrastructure), Verval (assistance and extension team), Bukit Jaya Village Companion Officers, Bukit Jaya Village Head, Community recipients of fertilizer assistance, and Communities who did not receive fertilizer assistance. Based on the results of research on the Implementation of the Fertilizer Assistance Program by the Pelalawan Regency Plantation and Animal Husbandry Service to Oil Palm Farmers in Bukit Jaya Village, Ukui District, there are still several obstacles

Keywords: Implementation, Fertilizer Assistance Program, and Oil Palm Farmers

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang lebih indah dari puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memutuskan bahwa segala sesuatu ada di tangan-Nya sehingga tidak setetes bendungan dan segenggam jiwa manusia pun lepas dari titah dan titah-Nya. Alhamdulillah dengan bimbingan dan inayahnya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Program Bantuan Pupuk Oleh Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Pelalawan Kepada Petani Sawit Di Desa Bukit Jaya Kecamatan Ukui”**. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana untuk Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung hingga terselesaikannya skripsi ini.

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Leni Nofianti, MS, SE, M.Si, AK, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Jajarannya.
2. Ibu Dr. Desrir Miftah, S.E M.M., Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Dr, Nurlasera S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr.Khairil Henry.S.E.,M.Si,Ak selaku Wakil Dekan II di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Mustiqowati Ummul F, S.Pd., M.Si selaku Wakil Dekan III di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Khairunsyah Purba S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc selaku Sekretaris Program studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Candra Jon Asmara, S.Sos.,M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan arahan serta memberikan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.
9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas ilmu yang bapak dan ibu berikan, semoga menjadi bekal bagi penulis dan menjadi ladang pahala bagi Bapak dan Ibu sekalian.
10. Karyawan dan Karyawati Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu dan memberikan pelayanan kepada penulis dalam urusan administrasi di Kampus.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Para pegawai kantor Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Pelalawan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Pelalawan.
12. Para pegawai Kantor Desa Bukit Jaya Kecamatan Ukui yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Desa Bukit Jaya Kecamatan Ukui.
13. Teristimewa Kepada Bapak dan Mama tercinta, sosok yang akan selalu hidup dalam ingatan dan hati penulis. Dua orang yang paling berjasa sepanjang hidup penulis. Terimakasih banyak penulis ucapkan atas segala pengorbanan dan ketulusan yang diberikan. Meskipun bapak dan mama tidak sempat merasakan pendidikan dibangku perkuliahan, namun senantiasa memberikan doa dan dukungan baik secara moral maupun finansial, sehingga anak perempuan satu-satunya dapat menyandang gelar sarjana seperti yang diharapkan.
14. Kepada kedua saudara sedarah saya Wahid Pangestu, S.Kom dan Arif Darmawan, S.Pd serta seluruh keluarga besar yang tiada hentinya memberikan semangat, doa dan motivasi selama ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini pada tepat waktu.
15. Kepada sahabat - sahabat penulis Anggun Wulan Sari, Anggi Purwasih, Eka Nur Firmala, Tiana Syaputri, Diah Wahyu Ningsih, dan Siti Hafsa yang sudah senantiasa kebersamai dan memberikan support, doa, waktu kepada penulis dalam perjalanan penelitian dan penyusunan skripsi penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16. Kepada pemilik NPM 236610647 yang selalu menemani dan hadir dalam suka dan duka selama perjalanan perkuliahan penulis. Terimakasih atas doa, waktu, dan semangat yang tidak pernah bosan diberikan kepada penulis. Penulis sudah berupaya memberikan hasil terbaik untuk Skripsi ini, namun

Penulis menyadari bahwa karya ini masih perlu penyempurnaan. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan karya ini di masa mendatang dari semua pihak. Harapan penulis semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Pekanbaru, 15 Mei 2026

Penulis

CITRA AMALIA SYAHIDAH
NIM : 12270521767

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pemerintahan Daerah.....	15
2.2 Program Pemerintah	16
2.3 Program Bantuan Pupuk Oleh Pemerintah.....	17
2.4 Kebijakan Publik	18



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5	Proses Kebijakan Publik.....	19
2.6	Implementasi	22
2.7	Pandangan Islam.....	27
2.8	Penelitian Terdahulu.....	29
2.9	Definisi Konsep	32
2.10	Konsep Operasional.....	34
2.11	Kerangka Berfikir.....	35

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Lokasi Penelitian	37
3.2	Tipe Penelitian.....	37
3.3	Jenis Data dan Sumber Data.....	37
3.4	Informan Penelitian	38
3.5	Teknik Pengumpulan Data	39
3.6	Teknik Analisa Data	39

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1	Kabupaten Pelalawan	42
4.2	Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Pelalawan.....	45
4.3	Desa Bukit Jaya	49

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1	Implementasi Program Bantuan Pupuk Oleh Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Pelalawan Kepada Petani Sawit Di Desa Bukit Jaya Kecamatan Ukui	58
-----	---	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.2 Hambatan Dalam Implementasi Program Bantuan Pupuk Oleh Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Pelalawan Kepada Petani Sawit Di Desa Bukit Jaya Kecamatan Ukui	111
---	-----

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan.....	115
6.2 Saran.....	115

DAFTAR PUSTAKA.....	117
----------------------------	------------



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Besaran Paket Bantuan Pupuk 3
Tabel 1.2	Jumlah Penerima Bantuan Pupuk 4
Tabel 1.3	Persentase Penerima Bantuan Pupuk 4
Tabel 1.4	Data Gapoktan Penerimaan Pupuk Desa Bukit Jaya 5
Tabel 1.5	Perbandingan Luas Lahan Desa Bukit Jaya 7
Tabel 1.6	Data Indeks Desa Membangun Desa Bukit Jaya 8
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu 29
Tabel 2.2	Konsep Operasional 34
Tabel 3.1	Informan Penelitian 38
Tabel 4.1	Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pelalawan 43
Tabel 4.2	Jumlah Desa dan Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pelalawan 43
Tabel 4.3	Jumlah RT dan RW Menurut Kecamatan di Kabupaten Pelalawan 44
Tabel 4.4	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Pelalawan 44
Tabel 4.5	Jumlah Sumber Daya Manusia Di Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Pelalawan 47
Tabel 4.6	Penduduk Desa Bukit Jaya 51



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Penyerahan Bantuan Pupuk Kepada Penerimaan Pupuk Desa Bukit Jaya.....	6
Gambar 2.3 Kerangka Pikir	36
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Bukit Jaya.....	51
Gambar 5.1 Aplikasi Penentuan Koordinat Bagi Lahan Petani.....	

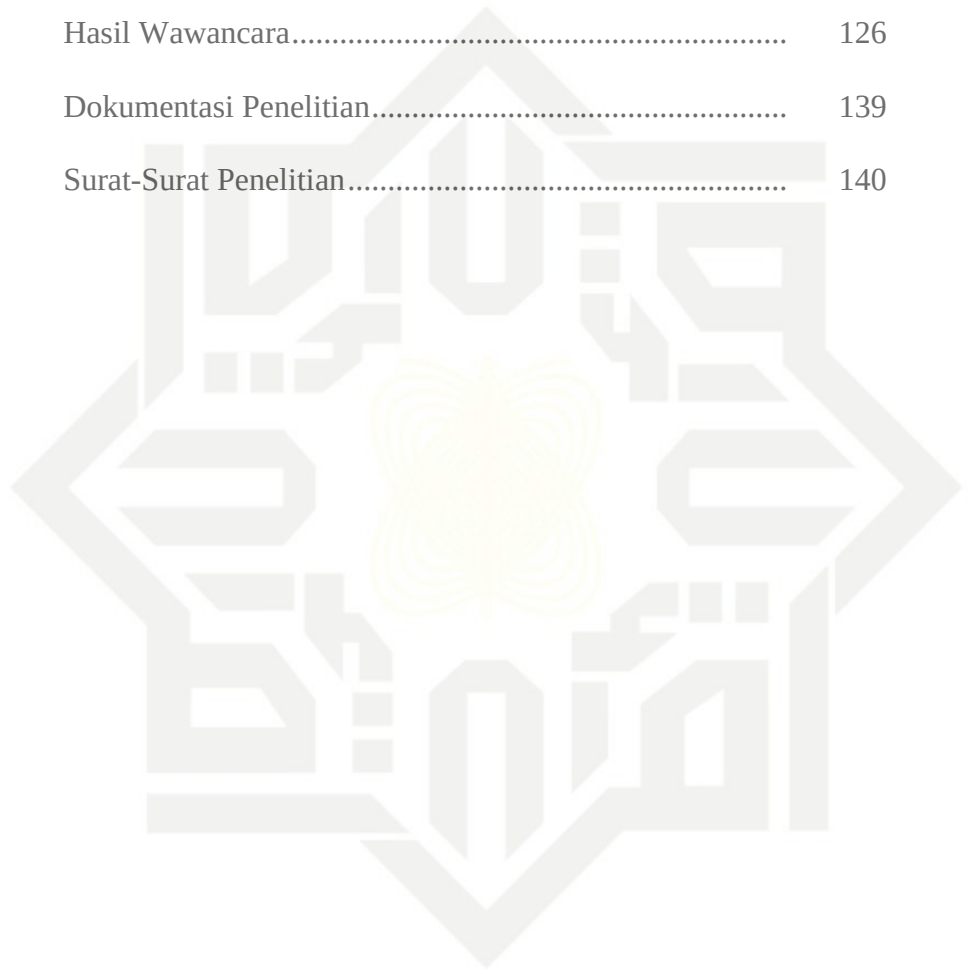


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran 1	Penyerahan Bantuan Pupuk Kepada Penerimaan Pupuk Desa Bukit Jaya	120
Lampiran 2	Hasil Wawancara.....	126
Lampiran 3	Dokumentasi Penelitian.....	139
Lampiran 4	Surat-Surat Penelitian.....	140



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 9 dijelaskan mengenai pemerintahan absolut dan pemerintahan paralel, dimana pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemerintahan yang sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah pusat, sedangkan pemerintahan paralel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemerintahan yang terbagi antara pemerintah pusat dengan daerah provinsi dan daerah perkotaan.

Selain tantangan ekonomi, aspek teknis pemupukan juga krusial bagi keberhasilan pertanian. Banyak petani kurang memahami jumlah dan metode pemupukan yang tepat, yang seringkali menyebabkan pemupukan yang tidak efisien. Pemupukan yang tidak tepat menyebabkan ketidakseimbangan unsur hara dalam tanah, yang pada akhirnya berdampak negatif pada kualitas dan kuantitas tanaman. Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi petani kecil dalam mengakses pupuk, pemerintah telah menerapkan beberapa kebijakan Program Bantuan Pupuk dan dukungan pupuk, termasuk program pupuk gratis bagi organisasi pertanian.

Kebijakan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang menegaskan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi petani kecil. Lebih lanjut, regulasi distribusi pupuk ditetapkan melalui Peraturan Menteri

Pertanian Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, yang menekankan pentingnya transparansi, ketepatan sasaran, dan efisiensi dalam penyaluran pupuk kepada petani yang membutuhkan.

Pada tahun 2018, luas perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pelalawan mencapai 447.487 hektar. Data ini merujuk pada perkebunan rakyat. Pada tahun 2007, luas perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pelalawan mencapai 162.500 hektar, dengan produksi sebesar 471.770 ton. Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu sentra pengembangan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau.

Tujuan pemerintah dengan Program Bantuan Pupuk adalah untuk memastikan petani memiliki akses terhadap pupuk yang terjangkau dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pertanian mereka. Namun, keberhasilan program ini bergantung pada sistem distribusi dan pemantauan kuantitas. Program Bantuan Pupuk ini merupakan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur, yang memberikan dasar hukum pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pemberian Subsidi Pupuk, yang bertujuan untuk meningkatkan produksi bagi petani kelapa sawit. Prospeknya berfokus pada dampak Program Bantuan Pupuk terhadap petani kelapa sawit setelah menerima Program Bantuan Pupuk, apakah cukup untuk menutupi tingginya anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Regulasi terkait Program Bantuan Pupuk oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan terdiri dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Subsidi Pupuk untuk Meningkatkan Produksi bagi Petani Kelapa Sawit.

Dari hasil pengamatan di ketahui bahwa seringkali petani kelapa sawit menerima jumlah pupuk tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana aturan besaran paket bantuan pupuk berikut:

Tabel 1.1
Besaran Paket Bantuan Pupuk

No	Luas Tanah	Jenis	Ukuran
1	1 (satu) hektare	Pupuk Nitrogen	50 (lima puluh) kilogram
		Phosphat	50 (lima puluh) kilogram
		Kalium (Pupuk NPK)	50 (lima puluh) kilogram
		Pupuk Dolomit	100 (seratus) kilogram
2	Kurang dari 1 (satu) hektare	Pupuk Nitrogen	50 (lima puluh) kilogram
		Phosphat	50 (lima puluh) kilogram
		Kalium (Pupuk NPK)	50 (lima puluh) kilogram
		Pupuk Dolomit	50 (lima puluh) kilogram

Catatan : Luas lahan kurang dari 1 (satu) hektare ditetapkan luas minimumnya adalah 0,4 (nol koma empat) hektare

Sumber: Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan, 2025

Berdasarkan tabel di atas, besaran paket bantuan diperkirakan akan meningkatkan produksi petani kelapa sawit pada tahun 2025. Petani/pekebun kelapa sawit dengan luas lahan kurang dari 1 (satu) hektar akan menerima maksimal 50 (lima puluh) pupuk nitrogen, fosfat, dan kalium (pupuk NPK) dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maksimal 50 (lima puluh) pupuk dolomit per penerima sesuai dengan anggaran yang tersedia. Untuk luas lahan kurang dari 1 (satu) hektar, kapasitas minimal adalah 0,4 (nol koma empat) hektar.

Kebijakan pemberian bantuan produksi pupuk kepada petani kelapa sawit di Kabupaten Pelalawan tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 40 Tahun 2022 tentang Penyediaan Pupuk untuk Peningkatan Produksi bagi Petani Kelapa Sawit. Tujuan dari proyek ini adalah untuk meningkatkan produktivitas tanaman, mengurangi biaya produksi petani, dan memperkuat daya saing produk kelapa sawit di pasar domestik dan internasional.

Tabel 1.2
Jumlah Penerima Bantuan Pupuk di Kabupaten Pelalawan

No	Tahun	Jumlah Kelompok Tani
1	2023	150 kelompok
2	2024	200 kelompok

Sumber: Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan, 2025

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pada berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Pelalawan, jumlah kelompok tani penerima pupuk gratis DI Kabupaten Pelalawan meningkat dari 150 kelompok pada tahun 2023 menjadi 200 kelompok pada tahun 2024.

Tabel 1.3
Persentase Penerima Bantuan Pupuk pada Desa Bukit Jaya

No	Jumlah Petani		Persentasi (%)
1	Total petani sawit	236 petani	100 %
2	Penerima Program Bantuan Pupuk	108 petani	46 %
3	Petani tidak menerima Program Bantuan Pupuk	128 petani	54 %

Dari hasil pengamatan peneliti diketahui bahwa pada Desa Bukit Jaya terdapat 236 orang petani sawit dengan kelompok berjumlah 8 kelompok tani

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terdaftar di KUD Bina Usaha Baru Desa Bukit Jaya. Sementara itu jumlah petani sawit yang menerima Program Bantuan Pupuk hanya sebanyak 108 orang yang terbagi kembali lagi kedalam 4 kelompok.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan lokasi peneliti di Desa Bukit Jaya dengan data penerimaan pupuk sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.4
Data Gapoktan Penerimaan Pupuk Desa Bukit Jaya

No	Desa	Penerima Bantuan		Jenis Pupuk
		Kelompok Tani	Jumlah Petani	
1	Desa Bukit Jaya	Eka Sejahtera	30	Pupuk Nitrogen
		Sahaja Tani	23	Phosphat
		Dwi Makmur	29	Kalium (Pupuk NPK)
		Tri Raharja	26	Pupuk Dolomit
Jumlah			108	

Sumber: Dokumentasi Kantor Desa Bukit Jaya, 2025

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa penerima bantuan pupuk Desa Bukit Jaya sebanyak 108 Petani. Dalam pemilihan penerima bantuan pupuk di Desa Bukit Jaya memiliki pertimbangan. Salah satu syarat penerima bantuan pupuk di Desa Bukit Jaya yaitu harus memiliki minimal 5000m², surat-surat lengkap, bersedia diambil titik koordinat.

Untuk mendukung Program Bantuan Pupuk, yang biasanya dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau instansi terkait, para deputy di setiap desa menugaskan penyuluh pertanian atau petani untuk memulai dan mengawasi penyaluran Program Bantuan Pupuk kepada petani yang memenuhi syarat. Para penyuluh ini bertanggung jawab untuk memastikan proses penyaluran berlangsung transparan, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan, sekaligus mengedukasi petani tentang cara terbaik menggunakan pupuk.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program Bantuan Pupuk Kabupaten Pelalawan secara khusus ditujukan kepada petani kelapa sawit dan diamanatkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 40 Tahun 2022. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi kelapa sawit, mengurangi biaya produksi, dan meningkatkan daya saing di pasar komoditas. Program Bantuan Pupuk didistribusikan kepada kelompok tani atau petani melalui produsen, distributor, dan pengecer.

Program penyaluran pupuk di Provinsi Pelalawan, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2022 tentang Provinsi Pelalawan, meliputi beberapa tahapan. Petani harus bergabung dalam kelompok tani dan menyiapkan rencana aplikasi akhir kelompok secara elektronik (E-RDKK). Data kelompok tani yang valid kemudian dikirimkan ke Kementerian Pertanian untuk verifikasi dan alokasi pupuk. Pupuk kemudian didistribusikan melalui kios distribusi khusus (KPL), dan petani dapat mengimbangi Program Bantuan Pupuk berdasarkan alokasi tertentu.

Gambar 1.1
Penyerahan Bantuan Pupuk Kepada Penerimaan Pupuk Desa Bukit Jaya



Sumber: Dokumentasi Lapangan Pendampingan Desa Bukit Jaya, 2025

Berdasarkan data monografi desa Bukit Jaya diketahui bahwa lahan perkebunan cukup luas yakni seluas 612 Ha dari total luas Desa Bukit Jaya seluas 1.129 Ha. Program Bantuan Pupuk pada daerah yang memiliki potensi kebun

No	Luas Wilayah	Persentasi (%)	
1	Luas Desa Bukit Jaya	1.129 Ha	100 %
2	Lahan perkebunan	612 Ha	54%

Berdasarkan data monografi desa Bukit Jaya diketahui bahwa lahan perkebunan cukup luas yakni seluas 612 Ha dari total luas Desa Bukit Jaya seluas 1.129 Ha. Program Bantuan Pupuk pada daerah yang memiliki potensi kebun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sawit sangat penting untuk berbagai alasan, terutama bagi para petani swadaya atau petani kecil. Program Bantuan Pupuk membantu meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya produksi, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional.

Tabel 1.6
Data Indeks Desa Membangun Desa Bukit Jaya

No	Kategori	Persentase
1	Indeks Sosial (IKS)	33,2 %
2	Indeks Ekonomi (IKE)	29,3 %
3	Indeks Lingkungan (IKL)	37,5 %

Berdasarkan data indeks desa membangun diatas diketahui bahwa indek ekonomi Desa Bukit Jaya masih rendah yakni sebesar 29.3% sehingga dalam hal ini akan cocok bila di terapkannya Program Bantuan Pupuk gratis di desa Bukit Jaya.

Penyaluran Program Bantuan Pupuk memiliki kriteria tertentu yang harus di penuhi oleh calon penerima Program Bantuan Pupuk:

- Petani yang memiliki KTP beralamat di Desa Bukit Jaya dan berdomisili di Desa Bukit Jaya
- Petani/pekebun kelapa sawit dengan luas lahan kurang dari 1 hektar dan petani yang memiliki lahan 1 (satu) hektar
- Pemilik lahan juga harus memiliki sertifikat tanah.
- Petani tersebut belum pernah dan tidak sedang menerima bantuan pupuk dari manapun
- Bersedia mengisi berkas kelengkapan data lainnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Afridinata (2025: 283)Dari sisi ketepatan sasaran, mayoritas petani penerima bantuan adalah petani kecil dengan luas lahan di bawah 2 hektar, yang memang menjadi prioritas program. Dampak langsung program terlihat dari peningkatan hasil panen dan pendapatan petani. Berdasarkan data lapangan, petani yang mengikuti program ini mengalami peningkatan produksi tandan buah segar (TBS) sebesar rata-rata 25% dibandingkan sebelum menerima bantuan. Selain itu, program ini juga mendorong petani untuk lebih disiplin dalam pola pemupukan dan perawatan tanaman. Dalam hal ini sasaran utama program bantuan pupuk kelapa sawit adalah petani swadaya (pekebun rakyat) yang tergabung dalam kelompok tani (Poktan) atau koperasi, khususnya untuk meningkatkan produktivitas lahan, kesejahteraan, dan menekan biaya produksi. Bantuan ini sering ditujukan bagi kebun dengan usia produktif atau peremajaan (PSR).

Dari pengamatan diketahui adanya kesenjangan hukum merupakan suatu keadaan dimana terdapat ketidaksesuaian di lapangan yang biasanya disebut Das Sollen dan Das Sein. Menurut Subekti (2014: 15) Das Sollen itu adalah peraturan hukum yang bersifat umum, sedangkan Das Sein adalah peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat. Lebih lanjut menurut Sudikno Mertokusumo, peristiwa konkret perlu dicarikan hukumnya yang bersifat umum dan abstrak. Peristiwa konkret harus dipertemukan dengan peraturan hukum itu. Sebaliknya, peraturan hukumnya harus (Das Sollen) yang bersifat umum dengan mengikat peristiwa konkret (Das Sein).

Dalam hal ini *Das sollen* terdiri dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi

untuk Sektor Pertanian, Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Subsidi Pupuk untuk Meningkatkan Produksi bagi Petani Kelapa Sawit. Sedangkan *das sein* masih banyak masyarakat yang belum menerima Program Bantuan Pupuk gratis di desa Bukit Jaya, serta seringkali petani kelapa sawit menerima jumlah pupuk tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan fenomena di lapangan di ketahui beberapa permasalahan seperti :

1. Masih belum tepat sasaran program pemberian bantuan pupuk oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan karena banyak petani yang belum menerima.
2. Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui program pupuk karena minimnya sosialisasi kepada petani dari pemerintah desa
3. Kualitas pupuk yang diberikan masih cenderung tidak baik dibandingkan dengan pupuk yang biasa digunakan oleh petani
4. Seringkali petani kelapa sawit menerima jumlah pupuk tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Penelitian ini berfokus pada meneliti Program Bantuan Pupuk sangat mendesak karena program ini adalah kebijakan strategis untuk ketahanan pangan nasional. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi banyak masalah, mulai dari penyaluran yang tidak tepat sasaran hingga penyelewengan, yang semuanya memerlukan evaluasi mendalam melalui penelitian. Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang Implementasi Program

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bantuan Pupuk Oleh Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Pelalawan Kepada Petani Sawit Di Desa Bukit Jaya Kecamatan Ukui.

1.2 Rumusan Masalah

Melalui uraian permasalahan tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah implementasi Program Bantuan Pupuk Oleh Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Pelalawan Kepada Petani Sawit Di Desa Bukit Jaya Kecamatan Ukui?
2. Apa saja hambatan dalam implementasi Program Bantuan Pupuk Oleh Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Pelalawan Kepada Petani Sawit Di Desa Bukit Jaya Kecamatan Ukui?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Program Bantuan Pupuk Oleh Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Pelalawan Kepada Petani Sawit Di Desa Bukit Jaya Kecamatan Ukui.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam implementasi Program Bantuan Pupuk Oleh Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Pelalawan Kepada Petani Sawit Di Desa Bukit Jaya Kecamatan Ukui.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain:

Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam implementasi program bantuan pupuk oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan kepada petani sawit di Desa Bukit Jaya Kecamatan Ukui. Selain itu penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi dalam merancang implementasi program bantuan pupuk oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat :

- a. Bagi Dinas Perkebunan dan Peternakan Pelalawan yaitu menjadi panduan untuk merumuskan SOP yang lebih baik guna memastikan bantuan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.
- b. Bagi Pemerintah Kabupaten Pelalawan yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program bantuan agar terhindar dari penyimpangan.
- c. Bagi Petani Kelapa Sawit yaitu memastikan bantuan pupuk benar-benar diterima sehingga meningkatkan hasil panen dan pendapatan petani.

15

Pen

BA

Ba
pen

BA

Bal
me

BA

Bab
Jen

BA

Dal
per

BA

Dal
Bar
Pel

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan hasil penelitian yang diperoleh dari pembahasan dan juga memuat saran-saran bagi pihak yang berkepentingan agar bisa menjadi lebih baik lagi dimasa yang akan datang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat 2, menyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip kemandirian yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peran pembangunan perumahan regional dapat diartikan sebagai penyeimbangan wilayah, pengelolaan, dan pemeliharaan perumahan. Peran pemerintah daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah:

1. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
3. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Program Pemerintah

Menurut Riggs (2005:54) program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Unsur kedua yang harus dipenuhi dalam proses implementasi program yaitu adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program, sehingga masyarakat dilibatkan dan membawa hasil dari program yang dijalankan dan adanya perubahan dan peningkatan dalam kehidupannya. Tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat maka dikatakan program tersebut telah gagal dilaksanakan. Berhasil atau tidaknya suatu program diimplementasikan tergantung dari unsur pelaksanaannya (eksekutif). Unsur pelaksanaan ini merupakan unsur ketiga. Pelaksanaan penting artinya karena pelaksanaan baik itu organisasi maupun perorangan bertanggungjawab dalam pengelolaan maupun pengawasan dalam proses implementasi..

Menurut (Nugroho, 2012) program pemerintah merupakan langkah-langkah pemerintah yang spesifik dan sekaligus merupakan kebijakan. Kebijakan adalah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kategori: peraturan pemerintah tertulis (rules and regulations) dan peraturan tidak tertulis yang disepakati bersama (agreement).

Menurut (Manila, 2006), proyek adalah serangkaian tugas yang mencakup langkah-langkah menuju pencapaian tujuan dan harus menjadi elemen pertama dalam implementasi suatu proyek. Yermias, 2004 juga menyatakan bahwa perencanaan, interpretasi, dan implementasi merupakan kriteria evaluasi keberhasilan suatu proyek.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Program Bantuan Pupuk Oleh Pemerintah

Menurut Balai Pustaka, 2005 pupuk adalah bahan yang mengandung unsur hara yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Program Bantuan Pupuk adalah sumbangan dari petani. Dengan demikian, Program Bantuan Pupuk adalah tujuan produksi yang untuknya petani menerima dukungan. Pupuk adalah bahan kimia atau organik yang digunakan untuk secara langsung atau tidak langsung menyediakan unsur hara bagi tanaman. Menurut Meaty Taqdir Qodratilah, 2011 pupuk juga didefinisikan sebagai bahan yang ditambahkan ke dalam tanah atau tanaman dengan tujuan menyediakan unsur hara.

Sebagaimana tercantum dalam Surat Menteri Perdagangan No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Sektor Pertanian, Program Bantuan Pupuk adalah barang yang disediakan dalam bentuk bantuan pupuk oleh Menteri untuk kepentingan petani dan/atau petani di sektor pertanian. Program Bantuan Pupuk meliputi pupuk urea, pupuk SP 36, pupuk ZA, pupuk NPK, dan jenis pupuk lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Program Bantuan Pupuk adalah pupuk organik dan anorganik yang diproduksi atau dibeli dari lembaga Program Bantuan Pupuk. Program Bantuan Pupuk meliputi urea, SP-36, ZA, dan NPK. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong efisiensi penggunaan pupuk melalui perumusan kebijakan, pengadaan, distribusi, dan penetapan harga Program Bantuan Pupuk. Program Bantuan Pupuk pupuk, jika diterapkan dengan tepat, diharapkan dapat meningkatkan hasil panen

dan pendapatan petani, karena penggunaan Program Bantuan Pupuk meningkatkan hasil panen dibandingkan dengan penggunaan Program Bantuan Pupuk.

2.4 Kebijakan Publik

Menurut Carl Friedrich dalam (Leo Agustino, 2006), kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu situasi, terutama ketika terdapat hambatan dan peluang, di mana kebijakan tersebut dirancang untuk awalnya memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan yang diinginkan.

Menurut Bridgeman dan Davis dalam (Suharto, 2007), kebijakan publik setidaknya memiliki tiga aspek yang saling terkait: pengambilan keputusan yang objektif, andal, dan hipotetis. Menurut Marzali, 2012) dari perspektif yang terpusat atau sempit, kebijakan adalah alat yang teknis, logis, dan berorientasi pada tindakan untuk memecahkan masalah. Kebijakan adalah rencana tindakan yang memandu dan memengaruhi perilaku banyak orang yang terdampak oleh keputusan tersebut.

Menurut (Nugroho, 2012) kebijakan publik merupakan konsep kompleks yang mencakup beragam pendapat para ahli. Pada dasarnya, kebijakan publik mengacu pada tindakan yang diambil oleh pemerintah atau kelompok tertentu untuk mencapai tujuan sosial tertentu. Kebijakan publik juga mengacu pada bagaimana pemerintah atau para pemangku kepentingannya merespons tata kelola dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, beberapa kesimpulan dapat ditarik tentang ciri-ciri utama definisi kebijakan publik. Pertama, perhatian publik terhadap pembuatan kebijakan umumnya berfokus pada tindakan-tindakan dengan tujuan atau sasaran tertentu, alih-alih pada perilaku yang berubah-ubah atau sewenang-wenang. Kedua, kebijakan publik sebenarnya melibatkan serangkaian tindakan atau pola yang diambil oleh pejabat pemerintah, alih-alih keputusan-keputusan spesifik. Ketiga, kebijakan publik adalah apa yang sebenarnya dilakukan pemerintah untuk mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau menyediakan layanan kepada warga negara, bukan apa yang ingin atau akan mereka lakukan. Keempat, kebijakan publik dapat bersifat positif atau negatif. Di sisi positif, pembuatan kebijakan melibatkan tindakan pemerintah yang jelas untuk mengatasi suatu masalah; di sisi negatif, kebijakan publik dapat melibatkan keputusan pejabat untuk tidak mengambil tindakan atau tidak mengambil tindakan sama sekali ketika intervensi pemerintah diperlukan dalam konteks tersebut. Kelima, kebijakan publik, setidaknya secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang diperlukan.

2.5 Proses Kebijakan Publik

Menurut Suharno (2010: 52) proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun demikian, para administrator sebuah organisasi institusi atau lembaga dituntut memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan atau keahlian,

sehingga dapat membuat kebijakan dengan resiko yang diharapkan (intended risks) maupun yang tidak diharapkan (unintended risks).

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn dalam Budi Winarno (2007: 32-34 adalah sebagai berikut :

a) Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan- alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b) Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy options)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan.

d) Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e) Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yamh menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

2.6 Implementasi

Menurut (Wahab, 2004), implementasi adalah keputusan kebijakan mendasar, paling sering dalam bentuk undang-undang, tetapi bisa juga dalam bentuk perintah atau keputusan pemerintah yang penting atau putusan badan peradilan.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Wahab, 2004), implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau pemerintah atau badan swasta dan ditujukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan dan ada enam variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu:

1. Standar dan tujuan kebijakan harus jelas dan terukur untuk menghindari interpretasi yang dapat menimbulkan konflik antar lembaga pelaksana.
2. Sumber Daya: Pengembangan kebijakan harus didukung oleh sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.
3. Komunikasi antar lembaga dan peningkatan aktivitas: Dalam banyak kasus, implementasi program membutuhkan dukungan dan koordinasi dengan lembaga lain untuk mencapai hasil yang diinginkan.
4. Karakteristik lembaga pelaksana: Sejauh mana kelompok kepentingan mendukung implementasi kebijakan. Ini mencakup karakteristik peserta,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apakah mereka mendukung atau menentangnya, opini publik di lingkungan tersebut, dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.

Kondisi sosial, ekonomi, dan politik mencakup sumber daya lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

Kecenderungan lembaga pelaksana

Menurut George C. Edward III dalam (Subarsono, 2005) memberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi sangat penting dalam penerapan bahasa resmi, penerapan yang sukses berarti orang-orang yang mengerjakannya sudah tahu apa yang akan mereka lakukan (George C. Edward III dalam (Subarsono, 2005). Menurut Edward III dalam (Widodo, 2010), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (transmission), kejelasan (clarity) dan konsistensi (consistency).

- a. Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (implementors) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Dimensi kejelasan (clarity) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.

- c. Dimensi konsistensi (consistency) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Sumber daya

Menurut (George C. Edward III dalam (Subarsono, 2005) sumber daya memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Kegagalan implementasi kebijakan seringkali terjadi karena kekurangan staf atau faktor-faktor yang mendukung).

Menurut Edward III dalam (Widodo, 2010) bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan

a. Sumber daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

b. Sumber daya Anggaran

Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas.

c. Sumber daya Peralatan

Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

d. Sumber daya Kewenangan

Sumberdaya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan.

3. Disposisi (sikap)

Jika kita ingin implementasi kebijakan menjadi efektif, mereka yang mengimplementasikannya tidak hanya harus tahu apa yang akan dilakukan, tetapi juga harus mampu mengimplementasikannya dengan cara yang bebas dari bias dalam praktik (George C. Edward III dalam (Subarsono, 2005)).

Menurut Edward III dalam Leo Agustinus (2006) faktor-faktor yang menjadi perhatian mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

- a. Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
- b. Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

4. Struktur Birokrasi

Menurut (George C. Edward III dalam (Subarsono, 2005)) Birokrasi sebagai pelaksana kebijakan harus mampu mendukung kebijakan yang berdampak politis dan melaksanakan koordinasi yang baik.

Menurut Ripley dan Franklin dalam (Winarno, 2005) mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu:

- a. Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (public affair).
- b. Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
- c. Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
- d. Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
- e. Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.

- f. Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

2.7 Pandangan Islam

Di antara sekian banyak fungsi negara dalam Islam adalah: menjamin keamanan dan pertahanan; penyiaran, baik sipil maupun sekutu; fungsi ekonomi dan keuangan serta sumber dayanya; urbanisasi; mengamankan penghidupan penduduk; solidaritas sosial; melindungi dakwah, yang berakar pada keyakinan dan moral Islam; Amar Ma'ruf Wal Nahi Munkar, totalitas yang menjadi dasar doa; agama; dan layanan publik, termasuk, antara lain, penyebaran pengetahuan dan pendidikan.

Al-Qur'an tidak menentukan model pemerintahan yang spesifik, sehingga bentuk pemerintahan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Surah An-Nisa ayat 56-59: Ayat-ayat ini memberikan petunjuk tentang kewajiban pemimpin dan rakyat, termasuk ketaatan pemimpin kepada Allah dan Rasul-Nya, serta ketaatan rakyat kepada pemimpin yang adil.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا * إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَوَدُّوا الْأَمْنَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

56. Sesungguhnya orang-orang yang kufur pada ayat-ayat Kami kelak akan Kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kulit yang lain agar mereka merasakan (kepedihan) azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

57. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan akan Kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sana mereka mempunyai pasangan-pasangan yang disucikan dan Kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman.

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Surah An-Nisa ayat 56-59 menegaskan konsekuensi bagi orang kafir dan beriman. Ayat 56-59 menggambarkan siksaan neraka bagi pengingkar ayat Allah dan balasan surga bagi orang beriman. Ayat 56-59 memerintahkan untuk amanah, berbuat adil dalam hukum, serta taat kepada Allah, Rasul, dan pemimpin. Dalam hal ini Allah memerintahkan umat Muslim untuk menyampaikan amanah (tanggung jawab, titipan) kepada yang berhak menerimanya. Jika menetapkan hukum di antara manusia, wajib bertindak adil. Ini adalah ajaran Allah yang sangat baik untuk kebaikan umat.

Surah Al-Maidah ayat 55: Ayat ini menegaskan bahwa Allah adalah pemilik kerajaan langit dan bumi, dan semua yang ada di dalamnya.

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

56. Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman yang menegakkan salat dan menunaikan zakat seraya tunduk (kepada Allah).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surah Al-Maidah ayat 55 menegaskan Allah adalah pencipta dan pemilik tunggal seluruh alam semesta. Tidak ada satu pun makhluk yang bersekutu dalam kepemilikan tersebut. Allah memiliki kuasa penuh untuk mengatur, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, dan menghukum. anusia seharusnya tunduk dan patuh kepada Allah karena segalanya bergantung pada-Nya.

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya digunakan sebagai perhitungan untuk menghindari pengaruh terhadap praktik ilmiah dan untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan belum ditinjau oleh rekan sejawat orang lain.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	(Afridinata, 2025)	Evaluasi Program Pemberian Bantuan Pupuk untuk Meningkatkan Produksi Bagi Petani Kelapa Sawit di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program ini bertujuan meningkatkan produktivitas petani sawit, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala seperti keterlambatan distribusi pupuk, ketidaktepatan sasaran penerima, serta kurangnya pendampingan teknis.	1. Lokasi 2. Fokus masalah pada evaluasi program
2	(Simatunadila, 2024)	Implementasi Program Ketahanan Pangan (Studi Dinas Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Manfaat yang dirasakan masyarakat lewat program gerakan pangan murah ini harga pangan yang terjangkau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Akan tetapi dibalik itu semua belum	1.Lokasi 2.Fokus masalah pada Program Ketahanan Pangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
		Provinsi Riau)	meratanya kegiatan ini dilakukan di setiap wilayah yang membutuhkan karena masih kekurangan akses dalam pemenuhan kebutuhan untuk daerah setempat.	
	(Mahmuhda, 2024)	Implementasi program Bantuan Pupuk Untuk Masyarakat desa Kapul Dan Desa Hauwai Di Kecamatan Halong kabupaten balangan	Implementasi Program Bantuan Pupuk untuk Masyarakat Desa Kapul dan Desa Hauwai Di Kecamatan Halong cukup baik. Indikator pertama Sosialisai sudah baik, Koordinasi sudah baik, Sumber daya manusia Sudah baik, Sumber daya material, dalam hal anggran masih kurang baik karena masih banyak kelompok tani tidak kebagian pupuk.	1.Lokasi 2.Fokus masalah pada kinerja pegawai
4	(Muhammad Wahyu, 2022)	Efektivitas Implementasi Program Pupuk Bersubsidi Oleh Dinas Pertanian Kabupaten Siak (Studi Kasus Kelompok Tani Kecamatan Tualang)	Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa efektivitas pelaksanaan program Pupuk Bersubsidi yang di Implementasikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Siak belum efektif, terutama dalam segi ketepatan sasaran program yang belum maksimal hal ini dikarenakan pemantauan program yang belum maksimal dan pencapaian tujuan program yang belum maksimal.	1.Lokasi 2.Fokus masalah pada efektivitas
	(Oni Lestari, 2022)	Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Program Kartu Tani	Hasil penelitian menunjukan bahwa pembuatan Kartu Tani di Desa Siwarak sudah sesuai pada regulasi yaitu pengusulan, penerbitan dan penebusan, namun dalam penerapannya masih belum optimal.	1.Lokasi 2.Fokus masalah pada Kebijakan
	(Nur Mufidah,	Implementasi Program	Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa	1.Lokasi 2.Fokus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
	(2018)	Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani Di Desa Durung Bedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo	implementasi program penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Durung Bedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo sudah cukup baik namun belum bisa ditebus dengan menggunakan Kartu Tani karena beberapa kendala yang dihadapi.	masalah pada Implementasi melalui kartu tani
	(Fajar Jami, 2016)	Implementasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi Di Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dilihat dari faktor komunikasi yaitu proses penyampaian informasi yang masih kurang optimal kepada petani mengenai kebijakan pupuk bersubsidi. Dilihat dari faktor Sumberdaya yaitu terutama sumberdaya manusia (staff)/pegawai dalam melaksanakan penyuluhan, sosialisasi maupun pengawasan dilapangan kepada petani di Kecamatan Muara Pawan sudah cukup memadai.	1.Lokasi 2.Fokus masalah Pada Pupuk Bersubsidi
	(Rachman, 2009)	Kebijakan Subsidi Pupuk: Tinjauan Terhadap Aspek Teknis, Manajemen Dan Regulasi	alam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan sistem distribusi pupuk bersubsidi perlu perbaikan kebijakan yang meliputi aspek teknis, manajemen dan regulasi.	1.Lokasi 2.Fokus masalah Pada Tinjauan Terhadap Aspek Teknis
	(Keo, 2024)	Kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dalam Program Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2018 -	Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam program penyaluran pupuk bersubsidi pegawai Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ngada belum menjalankan tugas sesuai dengan kebutuhan petani pada lahan pertanian hal ini disebabkan	1.Lokasi 2.Fokus masalah Pada Kinerja Dinas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
10	(Sularno, 2016)	Analisis Pelaksanaan Kebijakan Dan Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Karawang Jawa Barat	Masih terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan program pupuk bersubsidi, seperti ketika pendataan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), penjualan pupuk bersubsidi kepada yang tidak berhak, penghitungan volume penyaluran, pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, penghitungan subsidi pupuk, dan pengawasan program pupuk bersubsidi	1. Lokasi 2. Fokus masalah Pada Kebijakan Dan Distribusi Pupuk

2.9 Definisi Konsep

Adapun konsep penelitian ini untuk menghindari penafsiran yang beragam, maka diperlukan adanya penegasan istilah yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Kebijakan Publik

Seperangkat tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan, terutama ketika ada hambatan dan peluang yang ingin diatasi oleh kebijakan tersebut agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Pemerintahan Daerah

Pemerintah daerah provinsi bertugas menyelenggarakan pemerintahan daerah provinsi dan DPRD sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan berperan mendukung prinsip otonomi menyeluruh dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Program pemerintah

Program pemerintah merupakan suatu bentuk upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan juga merupakan suatu kebijakan

4. Program Bantuan Pupuk Oleh Pemerintah

Pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian

5. Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan mendasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, tetapi dapat juga berbentuk peraturan pelaksanaan atau keputusan badan peradilan terkait.

6. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik, implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan.

7. Sumber daya

Sumber daya memperngaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan salah satunya disebagikan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak komponen dibidangnya.

8. Disposisi (sikap)

Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

9. Struktur Birokrasi

Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

2.10 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah penerjemahan konsep atau variabel abstrak menjadi indikator yang konkret dan terukur. Hal ini merupakan langkah penelitian yang penting untuk memastikan bahwa variabel yang diteliti dapat diukur secara objektif dan konsisten. Konsep operasional penelitian ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Implementasi Program Pemberian Bantuan Pupuk Di Desa Bukit Jaya Oleh Dinas	Komunikasi	1. Transmisi 2. Kejelasan 3. Konsistensi
	Sumberdaya	1. Sumberdaya Manusia 2. Sumberdaya Anggaran 3. Sumberdaya Peralatan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

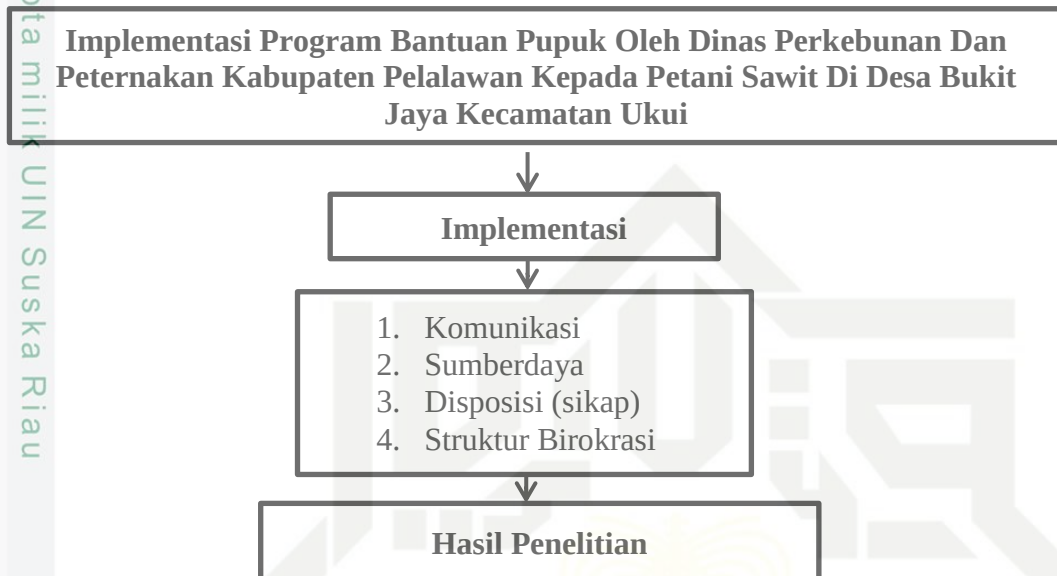
- | | Variabel | Indikator | Sub Indikator |
|--------------------|---------------------|--------------------|---|
| Hak cipta milik UI | Perkebunan Dan | | 4. Sumberdaya Kewenangan |
| | Peternakan | Disposisi (sikap) | 1. Pengangkatan birokrasi
2. Insentif |
| | Kabupaten Pelalawan | Struktur Birokrasi | 1. Birokrasi diciptakan sebagai instrumen
2. Kepentingan instansi
3. Tujuan dari instansi
4. Fungsi dalam lingkungan
5. Instansi melakukan pengendalian |

2.11 Kerangka Berfikir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.3
Kerangka Pikir



Sumber : Modifikasi George C. Edward III dalam (Subarsono, 2005)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Pelalawan karena peneliti tertarik terhadap Implementasi Program Pemberian Bantuan Pupuk Di Desa Bukit Jaya Oleh Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Pelalawan. Sedangkan waktu penelitian ini dilakukan dari bulan September hingga Desember.

3.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif. Menurut (Abdi Rianse, 2009), partisipan penelitian atau informan terlibat dalam kehidupan sehari-hari penelitian kualitatif. Oleh karena itu, peneliti kualitatif menjalin kontak sebanyak mungkin dengan informan, memahami kehidupan mereka secara detail, serta mengamati dan menelusuri perjalanan hidup mereka. Di sisi lain, menurut (Sugiyono, 2015), penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menganalisis temuan penelitian, bukan untuk menarik kesimpulan lebih lanjut.

3.3 Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yang merupakan sumber utama dalam penelitian ini, yakni data yang di perolehan langsung dari wawancara yang telah ditetapkan.

2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber primer, seperti dokumen, tesis, buku, dan temuan penelitian lainnya. Sumber-sumber ini dapat mencakup sumber-sumber yang sudah ada dan relevan sementara dengan penelitian ini.

3.4 Informan Penelitian

Menurut (Bungin, 2007), informan penelitian adalah individu yang memahami informasi tentang topik penelitian sebagai pihak atau orang lain yang memahami topik penelitian. Di sisi lain, menurut (Wasito, 1995), informan kunci adalah mereka yang memiliki pengetahuan paling banyak tentang topik penelitian atau tentang data yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumber primer.

Penulis dalam penelitian ini mengambil sumber data dari wawancara yang dilakukan terhadap beberapa informan dan key informan yakni:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Jabatan	Jumlah
1	Sapras (Sarana dan prasarana)	1
2	Verval (tim pendamping dan penyuluhan)	1
3	Petugas Pendamping Desa Bukit Jaya	1
4	Kepala Desa Bukit Jaya	1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Jabatan	Jumlah
5	Masyarakat penerima bantuan pupuk	2
6	Masyarakat yang tidak menerima bantuan pupuk	2
	Jumlah	8

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2025

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menurut (Singarimbun, 1995) observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena yang diamati. Dalam arti yang lebih luas, observasi tidak terbatas pada pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
2. Menurut (Sugiyono, 2012) wawancara, adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
3. Menurut (Sugiyono, 2013) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang.

3.6 Teknik Analisa Data

Menurut Bogdan dan Biklen dalam (Moleong, 2018), analisis data kualitatif merupakan suatu upaya yang melibatkan pengerjaan data, pengorganisasiannya, pengelompokannya ke dalam satuan-satuan yang dapat dikelola, melakukan sintesis, mencari dan menemukan pola, memahami apa yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penting dan apa yang telah dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat dibagikan kepada orang lain.

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui empat tahap, yaitu:

1. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, atau melalui kombinasi ketiga metode tersebut (analisis triangulasi). Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui observasi langsung di lokasi penelitian. Kemudian, peneliti mewawancarai partisipan dan meminta dokumentasi yang diperlukan, tergantung pada tujuan penelitian.

2. Reduksi Data

Setelah data penelitian terkumpul, reduksi data dilakukan untuk memilih dan merangkum informasi serta data yang valid dan relevan. Proses ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan memungkinkan pengorganisasian data yang koheren. Dalam penelitian ini, fase reduksi data merupakan bagian dari proses analisis. Oleh karena itu, keputusan peneliti mengenai segmen data mana yang akan dibuang, model mana yang akan disintesis dari berbagai segmen, dan narasi mana yang dihasilkan, semuanya merupakan keputusan analitis. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, atau informasi yang sesuai dengan fenomena yang ditemui, kemudian dikompilasi dan disintesis berdasarkan pertanyaan yang diajukan di lokasi penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penyajian Data

Langkah selanjutnya dalam proses pengolahan data adalah penyajian data. Menurut (Idrus, 2009), penyajian data adalah penyajian informasi yang terorganisir sehingga memungkinkan pengambilan kesimpulan dan langkah-langkah tindakan. Data dan informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi di lokasi penelitian disajikan dalam bentuk catatan wawancara, catatan observasi lapangan, dan catatan dokumentasi. Catatan-catatan ini kemudian diorganisasikan untuk memudahkan peneliti memahami fenomena dan interaksinya, sehingga memungkinkan analisis yang cepat dan mudah.

4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan diambil sepanjang proses penelitian, dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data, hingga penyajian data yang tepat. Setelah itu, kesimpulan awal (hipotesis) ditarik. Setelah data tersedia dan memenuhi persyaratan, kesimpulan akhir ditarik dan pengujian dilakukan untuk memastikan keandalan data yang diperoleh.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Kabupaten Pelalawan

4.1.1 Geografi Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan terletak di Pesisir Pantai Timur Pulau Sumatera antara 1,25' Lintang Utara sampai 0,20' Lintang Selatan dan antara 100,42' Bujur Timur sampai 103,28' Bujur Timur.

Sebelah Utara : Kabupaten Siak (Kecamatan Sungai Apit dan Kecamatan Siak), Kabupaten Kepulauan Meranti (Kecamatan Tebing Tinggi);

Sebelah Selatan : Kabupaten Indragiri Hilir (Kecamatan Kateman, Kecamatan Mandah, dan Kecamatan Gaung); Kabupaten Indragiri Hulu (Kecamatan Rengat, Kecamatan Pasir Penyu, Kecamatan Peranap, dan Kecamatan Kuala Cenayu); Kabupaten Kuantan Singingi (Kecamatan Kuantan Hilir, dan Kecamatan Singingi);

Sebelah Barat : Kabupaten Kampar (Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Siak Hulu); Kota Pekanbaru (Kecamatan Rumbai dan Tenayan Raya);

Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Luas wilayah Kabupaten Pelalawan kurang lebih 13.408,72 Km². Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 kecamatan dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Teluk Meranti yaitu 4.321,64 Km² (32,23 %) dan yang paling kecil adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan luas 223,45 Km² atau 1,67% dari luas Kabupaten Pelalawan.

Tabel 4.1
Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pelalawan

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas	%
1	Langgam	Langgam	1.535,26	11,45
2	Pangkalan kerinci	Pangkalan kerinci	223,45	1,67
3	Bandar sei kijang	Sekijang	408,23	3,04
4	Pangkalan kuras	Sorek satu	1.193,58	8,90
5	Ukui	Ukui satu	1.293,17	9,64
6	Pangkalan lesung	Pangkalan lesung	509,28	3,80
7	Bunut	Pangkalan bunut	423,00	3,15
8	Pelalawan	Pelalawan	1.368,77	10,21
9	Bandar petalangan	Rawang empat	372,30	2,78
10	Kuala kampar	Teluk dalam	757,21	5,65
11	Kerumutan	Kerumutan	1.002,78	7,48
12	Teluk meranti	Teluk meranti	4.321,64	32,23
Jumlah			13.408,72	100,00

4.1.2 Pemerintahan Kabupaten Pelalawan

Pada tahun 2023, kecamatan di Kabupaten Pelalawan berjumlah 12 Kecamatan, dengan 14 Kelurahan dan 118 Desa. Jumlah RT dan RW di Kabupaten Pelalawan berjumlah sebanyak 724.

Tabel 4.2
Jumlah Desa dan Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pelalawan

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Desa	Kelurahan
1	Langgam	Langgam	8	1
2	Pangkalan kerinci	Pangkalan kerinci	7	3
3	Bandar sei kijang	Sekijang	5	1
4	Pangkalan kuras	Sorek satu	17	1
5	Ukui	Ukui satu	12	1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Desa	Kelurahan
6	Pangkalan lesung	Pangkalan lesung	10	1
7	Bunut	Pangkalan bunut	10	1
8	Pelalawan	Pelalawan	9	1
9	Bandar petalangan	Rawang empat	11	1
10	Kuala kampar	Teluk dalam	10	1
11	Kerumutan	Kerumutan	10	1
12	Teluk meranti	Teluk meranti	9	1
Jumlah			118	14

Tabel 4.3
Jumlah RT dan RW Menurut Kecamatan di Kabupaten Pelalawan

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	RT	RW
1	Langgam	Langgam	160	49
2	Pangkalan kerinci	Pangkalan kerinci	329	74
3	Bandar sei kijang	Sekijang	71	29
4	Pangkalan kuras	Sorek satu	310	88
5	Ukui	Ukui satu	262	76
6	Pangkalan lesung	Pangkalan lesung	170	67
7	Bunut	Pangkalan bunut	113	52
8	Pelalawan	Pelalawan	117	49
9	Bandar petalangan	Rawang empat	129	53
10	Kuala kampar	Teluk dalam	157	65
11	Kerumutan	Kerumutan	181	64
12	Teluk meranti	Teluk meranti	138	58
Jumlah			2.137	724

4.1.3 Penduduk Kabupaten Pelalawan

Data penduduk di Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Pelalawan

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah	%
1	Langgam	Langgam	37.64	5.83
2	Pangkalan kerinci	Pangkalan kerinci	109.82	5.65
3	Bandar sei kijang	Sekijang	22.85	4.36
4	Pangkalan kuras	Sorek satu	70.55	5.22
5	Ukui	Ukui satu	43.54	4.82
6	Pangkalan lesung	Pangkalan lesung	30.88	4.45
7	Bunut	Pangkalan bunut	16.64	4.45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah	%
8	Pelalawan	Pelalawan	21.31	3.82
9	Bandar petalangan	Rawang empat	17.57	2.75
10	Kuala kampar	Teluk dalam	18.28	3.00
11	Kerumutan	Kerumutan	16.20	3.90
12	Teluk meranti	Teluk meranti	19.30	6.87
Jumlah			434.59	4.78

Berdasarkan data registrasi Disdukcapil, jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan tahun 2025 adalah 434.59 jiwa. Dengan penduduk tertinggi pada kecamatan Pangkalan kerinci sebanyak 109.82 jiwa dengan kecamatan dengan penduduk paling sedikit pada kecamatan Kerumutan sebanyak 16.20 jiwa.

4.2 Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Pelalawan

4.2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pelalawan Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, tugas pokok dari Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perkebunan dan Peternakan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis bidang Perkebunan dan Peternakan;
- Penyusunan perencanaan bidang Perkebunan dan Peternakan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perkebunan dan Peternakan;
4. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang Prasarana dan Sarana, Bidang Perkebunan, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Bidang Penyuluhan, Pengolahandan Pemasaran, serta kelompok jabatan fungsional;
5. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Perkebunan dan Peternakan;
6. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan dan Peternakan;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya Struktur Organisasi

4.2.2 Visi Dan Misi

VISI

“Pelalawan Maju 2026” dapat diartikan secara singkat yaitu Kondisi terwujudnya Kabupaten Pelalawan yang Makmur ekonominya, Adil dalam berkehidupan dan pembangunannya, Jaya kinerja daerahnya dan Unggul Sumber Daya Manusianya

MISI

1. Maju SDM yang Agamis

Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan iman.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Maju Ekonomi

Mewujudkan kemakmuran ekonomi di Perkotaan dan Perdesaan yang mandiri dan berdaya saing

3. Maju Infrastruktur

Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, lengkap , dan berkelanjutan

4. Maju Wisata & Budaya

Mengembangkan pariwisata daerah berbasis partisipasi masyarakat dan budaya melayu sebagai perekat negeri

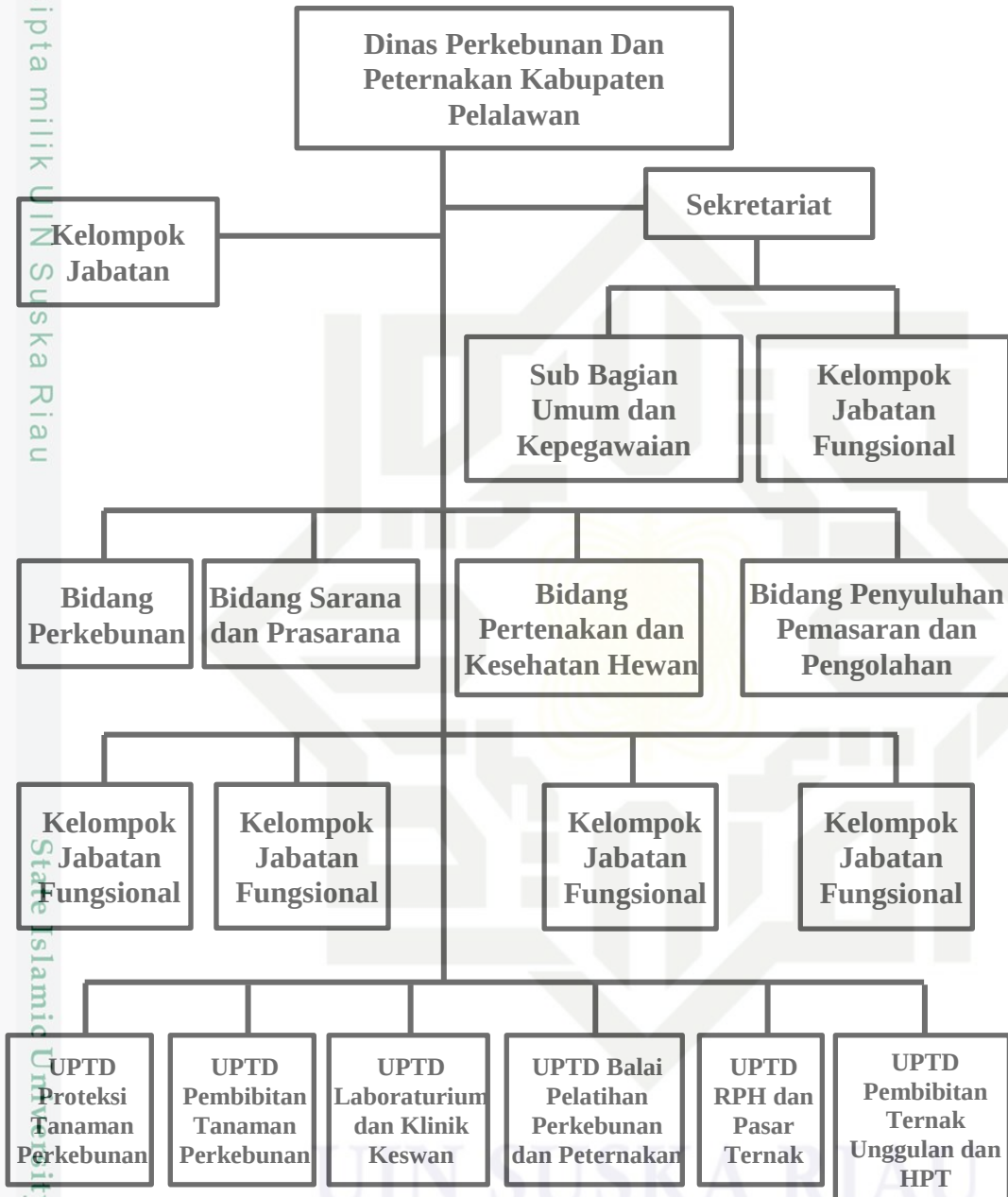
5. Maju Pemerintahan

Mewujudkan Tata Kelola dan layanan Pemerintahan yang humanis (Good Public Services) berbasis data dan teknologi informasi

Tabel 4.5
Jumlah Sumber Daya Manusia Di Dinas Perkebunan Dan Peternakan
Kabupaten Pelalawan

No	Kategori	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	PNS	36	22
2	Non PNS	120	56
Jumlah		156	78

4.2.3 Struktur Organisasi



Sumber: Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Pelalawan, 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3 Desa Bukit Jaya

4.3.1 Profil Desa Bukit Jaya

Desa Bukit Jaya merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, provinsi Riau, Indonesia. Pada era pemerintahan Presiden Soeharto disekitaran tahun 80-an diterapkan program Transmigrasi Perkebunan Inti Rakyat (Trans PIR). Salah satu dari program tersebut bertempat di Provinsi Riau Kabupaten Kampar Kecamatan Pangkalan Kuras Desa Air Hitam. Tepatnya pada tanggal 27 November 1987 pada waktu itu bernama SP 2 (Sector Penempatan Dua). Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman pada tanggal 04 Oktober 1999 dimekarkan Kabupaten Kampar dan salah satu pemekaran kabupaten tersebut adalah Kabupaten Pelalawan, setelah berdiri Kabupaten Pelalawan, maka mekarlah Kecamatan Pangkalan Kuras salah satunya adalah menjadi Kecamatan Ukui tepatnya pada tanggal 24 April 2001. Setelah berdirinya Kecamatan Ukui mekarlah Desa Air Hitam salah satunya adalah Desa Bukit Jaya.

Desa Bukit Jaya kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Tri Mulya Jaya
- Sebelah Selatan : Desa Kembang Sari
- Sebelah Timur : Desa Bukit Gajah
- Sebelah Barat : Desa Air Hitam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3.2 Visi Misi Desa Bukit Jaya

VISI :

Menyelenggarakan Pemerintahan yang Tertib dan Akuntabel untuk mewujudkan Desa Bukit Jaya yang Maju, Mandiri, serta lebih baik.

MISI :

1. Memberikan pelayanan publik yang prima, cepat dan ramah
2. Meningkatkan kinerja aparatur desa
3. Mengedepankan musyawarah dalam merencanakan pembangunan
4. Menggunakan anggaran yang tepat dan sesuai porsi
5. Mengelola pendapatan asli desa (PAD) yang transparan dan terkoordinir
6. Memberdayakan masyarakat dan kepemudaan untuk berpartisipasi langsung dalam pembangunan dan sumber-sumber pendapatan desa
7. Pemerataan pembangunan dan mendahulukan kebutuhan prioritas
8. Meningkatkan keamanan dan ketertiban bermasyarakat
9. Memajukan kegiatan olahraga dan senibudaya
10. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

4.3.3 Penduduk Desa Bukit Jaya

Jumlah penduduk Desa Bukit Jaya kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dapat diketahui dari tabel berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

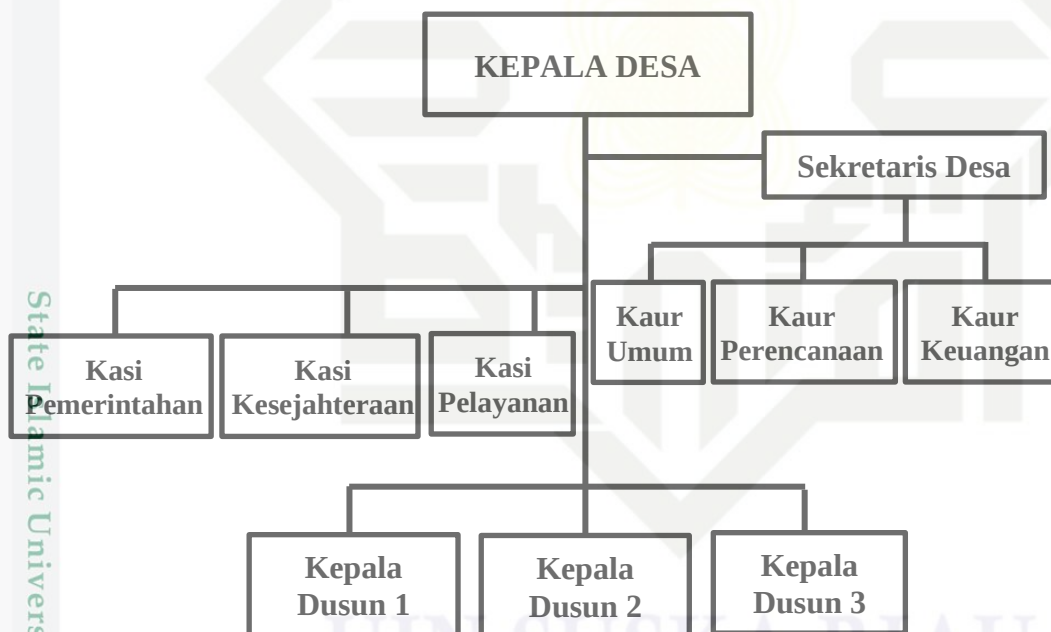
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.6
Penduduk Desa Bukit Jaya

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	1.052 jiwa
2	Perempuan	1.005 jiwa
Jumlah Penduduk Desa Bukit Jaya		2.057 Jiwa

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Desa Bukit Jaya memiliki penduduk sebanyak 2.057 Jiwa terdiri dari Laki-Laki sebanyak 1.052 jiwa dan Perempuan sebanyak 1.005 jiwa.

4.3.4 Struktur Organisasi



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Desa Bukit Jaya

Sumber: Kantor Desa Bukit Jaya, 2025

Adapun uraian tugas dan wewenang dari masing-masing jabatan pada struktur organisasi diatas diatur dalam peraturan daerah kabupaten pelalawan tentang susunan organisasi pemerintah kabupaten pelalawan:

Kepala Desa

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sekretaris Desa

1. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
2. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai,

Fungsi:

1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip,dan,ekspedisi.
2. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan, pelayanan umum.
3. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa, dan, lainnya.

- Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Kaur Pemerintahan Desa

Tugas pokok

- Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Desa

Fungsi :

- Sebagai Pelaksana kegiatan administrasi kependudukan
Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa
- Pelaksana kegiatan administrasi pertanahan
Pelaksana Kegiatan pencatatan monografi Desa
- Mengurus persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataankelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil.

Kaur Pembangunan

Tugas Pokok

1. Membantu Kepala Desa di bidang teknis dan administratif pelaksanaan pengelolaan pembangunan masyarakat desa
2. Membantu membina perekonomian desa
3. Mengajukan pertimbangan kepada kepala desa baik menyangkut rancangan peraturan desa maupun hal-hal yang bertalian dengan pembangunan desa d. Penggalan dan pemanfaatan potensi desa

Fungsi

1. Penyiapan bantuan analisa & kajian perkembangan ekonomi masyarakat
2. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan
3. Pelaksanaan kegiatan perencanaan dibidang pembangunan desa
4. Melaksanakan kegiatan dalam rangka membina perekonomian desa dan inventarisasi potensi desa
5. Pelaksana tugas-tugas pembangunan yang dilimpahkan oleh Kepala Desa
6. Pendataan perkembangan pembangunan di desa

Kepala Dusun

1. Kepala Dusun/Kadus adalah perangkat desa yang kedudukannya sebagai pembantu dari kepala desa di wilayahnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kepala Dusun/Kadus memiliki kewajiban dan tugas untuk menjalankan kegiatan pemerintahan, ketertiban, kemasyarakatan, ketentraman dan juga pembangunan di wilayahnya
3. Kepala Dusun/Kadus di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, bertanggung jawab kepada Kades (kepala desa)
4. Kepala Dusun bertugas untuk melaksanakan keputusan dari kebijakan yang diambil oleh kepala desa di wilayahnya
5. Kepala Dusun bertugas untuk juga membantu kepala desa di dalam berbagai kegiatan, seperti : pembinaan dan kerukunan warga serta penyuluhan
6. Kepala Dusun bertugas juga untuk melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh kepala desa

Bendahara Desa

Tugas

Bendahara menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan bertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja desa.

Fungsi

1. Mengelola keuangan.
2. Membuat pembukuan keuangan.
3. Meminta laporan keuangan pada bendahara ke-giatan.
4. Memegang uang kas
5. Mengembangkan uang kas
6. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan-kepengurusan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Menjadi teladan yang baik bagi pengurus.
8. Bersama direktur mengeluarkan dana untuk keperluan organisasi.
9. Mencatat seluruh transaksi ke-uangan yang berkaitan dengan kegiatan desa
10. Memotivasi pengurus yang lain

BPD

1. Menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
2. Menyelenggarakan musyawarah BPD dan musyawarah Desa;
3. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, dalam melakukan pemilihan kepada desa, BPD berhak membentuk panitia pemilihan kepala desa yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten;
4. Memberi persetujuan pemberhentian atau pemberhentian sementara perangkat desa;
5. Membuat susunan tata tertib BPD;
6. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
7. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
8. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
9. Mengevaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
10. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya

11. Menjalankan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan.
12. Pelaksana BLT di Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Program Bantuan Pupuk Oleh Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Pelalawan Kepada Petani Sawit Di Desa Bukit Jaya Kecamatan Ukui adalah petani sawit di desa bukit jaya sangat merasa terbantu dalam pemenuhan pemberian pupuk terhadap kebun sawitnya, hal ini membuktikan bahwasannya program ini sangat bermanfaat bagi petani sawit di desa Bukit Jaya Kecamatan Ukui. Namun masih terdapat beberapa hambatan dalam pengimplementasian program ini.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian adapun beberapa hambatan yang menghambat Implementasi Program Bantuan Pupuk Oleh Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Pelalawan Kepada Petani Sawit Di Desa Bukit Jaya Kecamatan Ukui yaitu minimnya pelatihan dan bimbingan teknis, petani yang sulit untuk melengkapi data, data petani sering tidak lolos atau memenuhi syarat verifikasi, dan sumber daya manusia yang rendah sangat mempengaruhi lancar atau tidaknya suatu program.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

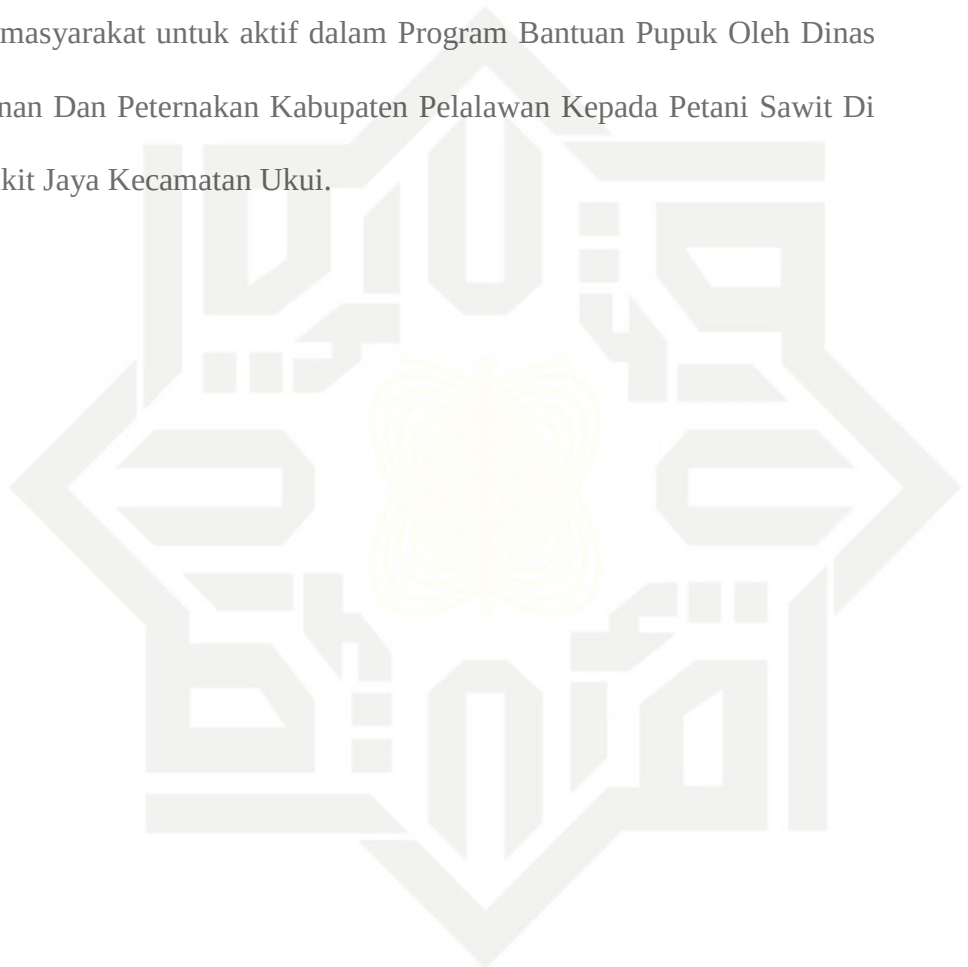
1. Kepada implementasi Program Bantuan Pupuk Oleh Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Pelalawan Kepada Petani Sawit Di Desa Bukit Jaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Ukui untuk meningkatkan kinerja dalam mengimplementasikan Program Bantuan Pupuk Oleh Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Pelalawan Kepada Petani Sawit Di Desa Bukit Jaya Kecamatan Ukui

Kepada masyarakat untuk aktif dalam Program Bantuan Pupuk Oleh Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Pelalawan Kepada Petani Sawit Di Desa Bukit Jaya Kecamatan Ukui.



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi Rianse. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi (Teori Dan Aplikasi)*. CV. Alfabeta.
- Afridinata. (2025). Evaluasi Program Pemberian Bantuan Pupuk Untuk Meningkatkan Produksi Bagi Petani Kelapa Sawit Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan Universitas Riau*, 4 Nomor. 2.
- Balai Pustaka. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Putra Grafika.
- Fajar Jami. (2016). Implementasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi Di Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapan. Publika. *Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016. Universitas Tanjungpura Pontianak*.
- Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. PT. Gelora Akasara.
- Keo, M. M. (2024). Kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dalam Program Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2018 -2023(Studi Kasus Petani Padi Di Desa Seso Kabupaten Ngada). *Jurnal Dharma Ekonomivolume 31, Nomor 1, April 2024. Universitas Nusa Cendana*.
- Leo Agustino. (2006). *Dasar-dasar Kebijaksanaan Publik*. CV. Alfabeta.
- Mahmuhda. (2024). Implementasi Program Bantuan Pupuk Untuk Masyarakat Desa Kapul Dan Desa Hauwai Di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan. *Jurnal Kebijakan Publik Vol. 1 No. 2 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai*.
- Manila, I. G. (2006). *Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri*. Jakarta.
- Marzali, A. (2012). *Antropologi dan Kebijakan Publik*. Kencana Prenada Media Group.
- Meaty Taqdir Qodratilah. (2011). *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*. Badan Pembangunan dan Pembinaan Bahasa.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Rosdakarya.
- Muhammad Wahyu. (2022). Efektivitas Implementasi Program Pupuk Bersubsidi Oleh Dinas Pertanian Kabupaten Siak (Studi Kasus Kelompok Tani

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Tualang). *Jurnal Cross-Border Vol. 5 No. 1 Januari-Juni 2022. Universitas Riau.*

Nugroho, R. (2012). *Public Policy*. Gramedia.

Nur Mufidah. (2018). Implementasi Program Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani Di Desa Durung Bedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. *Journal Publika Vol. 6 No. 9 (2018). Universitas Negeri Surabaya.*

Oni Lestari. (2022). Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Program Kartu Tani. *Journal Of Political Issues . Universitas 17 Agustus Jakarta, Volume 3,.*

Rachman, B. (2009). Kebijakan Subsidi Pupuk: Tinjauan Terhadap Aspek Teknis, Manajemen Dan Regulasi. *Jurnal Pusat Analisis Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian Volume 7 No. 2, Juni 2009.*

Simatunadila. (2024). *Implementasi Program Ketahanan Pangan (Studi Dinas Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Singarimbun, M. (1995). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta.

Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kuantitatif Dan Rnd*. Alfabeta.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta.

Sharto, E. (2007). *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Alfabeta.

Slarno. (2016). Analisis Pelaksanaan Kebijakan Dan Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Karawang Jawa Barat. *Jurnal Agrosains Dan Teknologi, Vol. 1 No.*

Wahab, S. (2004). *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke. Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara.

Wasito, H. (1995). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Gramedia Pustaka Utama.

Widodo. (2010). *Analisis Kebijakan Publik. Konsep Teori dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Bayumedia Publishing.

Winarno, B. (2005). *Kebijakan Publik Era Globalisasi: Teori, Proses, dan Studi*

Komparatif. Center of Akademik Publishing Service.

Yeremias, T. K. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori Dan Isu*. Gava Media.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 1

WAWANCARA PENELITIAN

TENTANG

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PUPUK OLEH DINAS
PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN
PELALAWAN KEPADA PETANI SAWIT DI
DESA BUKIT JAYA**



OLEH

**CITRA AMALIA SYAHIDAH
NIM : 12270521767**

UIN SUSKA RIAU

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025/1446 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

WAWANCARA PENELITIAN

TENTANG

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PUPUK OLEH DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN PELALAWAN KEPADA PETANI SAWIT DI DESA BUKIT JAYA

I. Identitas Peneliti

Nama : Citra Amalia Syahidah
Nim : 12270521767
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)

II. Petunjuk Pengisian

1. Silahkan isi informasi yang dibutuhkan sesuai dengan profil Bapak/Ibu
Memberikan jawaban berdasarkan bukti faktual yang berkaitan dengan
Implementasi Program Bantuan Pupuk Oleh Dinas Perkebunan Dan
Pernakan Kabupaten Pelalawan Kepada Petani Sawit Di Desa Bukit
Jaya Kecamatan Ukui.
2. Melengkapi artikel ini hanya untuk memperoleh informasi penelitian
yang akurat dan tidak mengubah pekerjaan atau jabatan ayah/ibu.
3. Terima kasih Bapak/Ibu telah melengkapi artikel ini

III. Data Responden

1. Umur : Tahun
2. Jenis Kelamin : Laki-laki ☐ Perempuan ☐
3. Pekerjaan :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**WAWANCARA PENELITIAN
TENTANG
IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PUPUK OLEH DINAS
PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN
PELALAWAN KEPADA PETANI SAWIT DI
DESA BUKIT JAYA**

A. Komunikasi

1. Bagaimanakah bentuk transmisi komunikasi yang dilakukan pemerintah dalam mengimplentasikan Program Bantuan Pupuk Oleh Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Pelalawan Kepada Petani Sawit Di Desa Bukit Jaya Kecamatan Ukui?

.....

.....

.....

2. Bagaimanakah bentuk kejelasan komunikasi yang di berikan Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Pelalawan dalam mengimplentasikan program bantuan pupuk oleh kepada petani sawit di Desa Bukit Jaya ?

.....

.....

.....

3. Bagaimanakah cara menjaga konsistensi komunikasi program bantuan pupuk dari Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Pelalawan kepada petani sawit di Desa Bukit Jaya ?

.....

.....

.....

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumberdaya

1. Bagaimanakah kondisi sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Pelalawan dalam mengimplentasikan program bantuan pupuk di Desa Bukit Jaya ?

.....

.....

.....

2. Bagaimanakah kondisi sumber daya anggaran yang dimiliki Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Pelalawan dalam mengimplentasikan program bantuan pupuk di Desa Bukit Jaya?

.....

.....

.....

3. Bagaimanakah kondisi sumber daya peralatan yang dimiliki Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Pelalawan dalam mengimplentasikan program bantuan pupuk di Desa Bukit Jaya?

.....

.....

.....

4. Bagaimanakah kondisi sumber daya kewenangan yang dimiliki Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Pelalawan dalam mengimplentasikan program bantuan pupuk di Desa Bukit Jaya?

.....

.....

.....

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disposisi (sikap)

1. Bagaimanakah sikap pegawai Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Pelalawan dalam mengimplentasikan program bantuan pupuk oleh kepada petani sawit di Desa Bukit Jaya ?

.....

.....

.....

2. Apakah ada insentif kepada pegawai atau masyarakat yang di berikan Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Pelalawan dalam mengimplentasikan program bantuan pupuk oleh kepada petani sawit di Desa Bukit Jaya ?

.....

.....

.....

D. Stuktur birokrasi

1. Bagaimanakah kondisi birokrasi yang diciptakan Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Pelalawan dalam mengimplentasikan program bantuan pupuk oleh kepada petani sawit di Desa Bukit Jaya ?

.....

.....

.....

2. Apa yang menjadi kepentingan Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Pelalawan dalam mengimplentasikan program bantuan pupuk oleh kepada petani sawit di Desa Bukit Jaya ?

.....

.....

.....

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Apakah yang menjadi tujuan Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Pelalawan dalam mengimplentasikan program bantuan pupuk oleh kepada petani sawit di Desa Bukit Jaya ?

.....

.....

.....

4. Bagaimanakah bentuk fungsi terhadap lingkungan dalam kaitannya dengan program bantuan pupuk oleh kepada petani sawit di Desa Bukit Jaya ?

.....

.....

.....

5. Bagaimanakah cara Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Pelalawan mengendalikan program pupuk agar berjalan lancar di Desa Bukit Jaya ?

.....

.....

.....



Lampiran 2

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic Univ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan buku, dan sebagainya.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

Hasil Wawancara

No	Indikator	Pertanyaan	Hasil Wawancara
	Komunikasi	Bagaimanakah bentuk transmisi komunikasi yang dilakukan pemerintah dalam mengimplentasikan Program Bantuan Pupuk Oleh Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Pelalawan Kepada Petani Sawit Di Desa Bukit Jaya Kecamatan Ukui?	Sapras (Sarana dan prasarana) Sosialisasi program, kemudian pendataan atau pemuktahiran data petamo kemudian pencarian titik koordinat atau verifikasi lahan, kemudian fasilitasi pendampingan kelompok tani terus pemberkasan persyarakat kelompok tani. Kemudian verifikasi proposal yang di lakukan oleh tim verval yang nanti di wakilin oleh pendamping desa di lapangan.
			Verval (tim pendamping dan penyuluhan) Ada dalam bentuk sosialisasi melalui Dinas datang ke petani kemudian menyurati kepala desa. Kepala desa lalu mengumpulkan para petani dan kita di bantu oleh penyuluh dan pendamping desa disana
			Petugas Pendamping Desa Bukit Jaya Sebetulnya terkait bantuan pupuk gratis ini pertama kali digadangkan ketika kampanye bupati sih, setauku. Cuman dari situ kan nggak bisa langsung diimplementasikan program tersebut karena harus ada SOP dan sebagainya. Kita langsung ke teknis di lapangan aja kali ya. Kami, pendamping desa, melakukan <i>briefing</i> bersama Dinas PMD dan Dinas Perkebunan terkait pendataan, pengambilan titik koordinat, dan pemberkasan. Setelah itu kita teruskan ke pemerintah desa bahwasanya akan dilaksanakan program bantuan pupuk pemda di desa kita.
			Kepala Desa Bukit Jaya Inikan memang program dari pemerintah jadi memang sudah ada agendanya dan memang resmi dari atas ya. Sosialisasinya ada yang melakukan sosialisasinya ada dari dinas nanti ada juga dari pendamping desa
			Masyarakat penerima bantuan pupuk 1 Awalnya tahunya dari kampanye terus ada dari dinas datang mensosialisasi untuk pendataan



No	Indikator	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1. Hak cipta milik UIN Suska Riau	Bagaimanakah bentuk kejelasan komunikasi yang di berikan Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Pelalawan dalam mengimplentasikan program bantuan pupuk oleh kepada petani sawit di Desa Bukit Jaya ?		Masyarakat penerima bantuan pupuk 2 Ada info ada sosialisasi yang di kasih tapi memang nggak semua yang bisa dapat hanya tertentu
			Masyarakat yang tidak menerima bantuan pupuk 1 Ada sosialisasi tapi memang nggak semua bisa ikut program itu harus banyak juga persyaratan yang harus di siapkan
			Masyarakat yang tidak menerima bantuan pupuk 2 Kami tidak tau secara langsung tapi memang ada yang cerita dari mulut ke mulut aja
			Sapras (Sarana dan prasarana) Adanya proposal persyaratan dan verifikasi kemudian penetapan dari pemerintahan yang di bantu oleh tim verval dari dinas nanti di lapangan juga di tunjuk pendamping desa untuk mengatur dan menseleksi petani secara langsung.
			Verval (tim pendamping dan penyuluhan) Kita langsung datang ke desa dan secara langsung memberi tahu ke masyarakat petani kalau ada program bantuan pupuk untuk petani dan nanti kita di bantu sama pendamping yang ada di desa dan nanti pendamping didesa yang membentuk kelompok tani untuk penerima bantuan pupuk ini
			Petugas Pendamping Desa Bukit Jaya Kita laporan terkait progress dengan dinas biasanya lewat <i>zoom/google meeting</i> atau lewat grup WA. Ada juga pertemuan tatap muka kayaknya, tapi aku kurang inget. Kalau pemerintah desa kita kondisional aja. Kalau aku pribadi sebisa mungkin seminggu sekali aku laporan udah sejauh mana progressnya. Program itu dulunya dikenal dengan program bantuan pupuk gratis. Tapi pas aku masuk jadi pendamping siaga nama programnya jadi program bantuan pupuk pemda.
			Kepala Desa Bukit Jaya Itu ada tugas dari pendamping yang akan menjelaskan langsung ke petani tentang syarat-syaratnya dan apa yang harus di lengkapi oleh masyarakat jika ingin mendapatkan bantuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, p
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau keperluan resmi yang lain.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

No	Indikator	Pertanyaan	Hasil Wawancara
Hak cipta milik UIN Suska Riau			pupuk dari pemerintah.
			Masyarakat penerima bantuan pupuk 1 Jelas karena memang yang datang ini memang dari pusat dan penjelasannya juga mudah dipahami
			Masyarakat penerima bantuan pupuk 2 Kalau syaratnya nggak ribet ya cuma KK, KTP sama surat tanah ya palingan ngukur tanah nanti pas ngukur tanah yang lama karena antrian jadi lama pas ngukurnya
			Masyarakat yang tidak menerima bantuan pupuk 1 Kalau di bilang jelas ya jelas tapi di peruntukkan seluruh masyarakat. Jelas sebenarnya karena memang ada timnya kan
			Masyarakat yang tidak menerima bantuan pupuk 2 Nggak jelas karena yang tau cuma yang kenal-kenal aja kalau yang nggak dekat ya nggak akan bisa ikut program itu
		Bagaimanakah cara menjaga konsistensi komunikasi program bantuan pupuk dari Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Pelalawan kepada petani sawit di Desa	Sapras (Sarana dan prasarana) Kalau penyalurannya kami kerja sama dengan pihak ketiga sedangkan kalau dari data yang di sesuaikan dengan data yang ada di proposal. Kalau proposal sudah jadi nanti proposal di serahkan ke tim verval dan di verifikasi dan akan naik ke dinas apakah dikeluarkan atau tidak. Ini nanti di rapatkan dan bahas apakah memang sudah sesuai atau belum.
			Verval (tim pendamping dan penyuluhan) Dengan pengajuan proposal jadi nanti dibuatkan proposalnya untuk kelompok penerima bantuan pupuk jadi dia nanti jelas dan konsisten untuk yang menerima
			Petugas Pendamping Desa Bukit Jaya Mereka turun untuk penyuluhan terkait teknis dan penggunaan aplikasi untuk ambil titik koordinat di lapangan. Itu kegiatannya sama pendamping doang. Kita pendataan online pakai google form yg nantinya disbunnak yg rekap dan ngolah datanya. Begitu juga titik koordinat kita kirim via WA. Selebihnya ya kita koordinasi via WA grup aja sampai proses selesai. Baru ketika bantuan pupuk turun mereka ikut pendistribusiannya ke masing-masing desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, p
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

No	Indikator	Pertanyaan	Hasil Wawancara
Hak cipta milik UIN Suska Riau		Bukit Jaya ?	Kepala Desa Bukit Jaya Konsistennya karena langsung dari pemerintah yang di wakili oleh pendamping yang langsung di tunjuk dinas jadi jelas dan konsisten dalam pendataan dan verifikasinya
			Masyarakat penerima bantuan pupuk 1 Ya konsisten karena memang yang kasih arahan memang dari pusat
			Masyarakat penerima bantuan pupuk 2 Ya konsisten ya dapat dari 2022 sampai 2024 dapat terus karena kan berlanjut ya tapi ya tetap mengumpulkan data-data lagi
			Masyarakat yang tidak menerima bantuan pupuk 1 Ya kan saya tidak ikut jadi kurang tau ya tentang konsistensinya itu
			Masyarakat yang tidak menerima bantuan pupuk 2 Kurang tau juga karena kami nggak dapat informasi pasti tentang programm pupuk gratis itu
	Sumberdaya	Bagaimanakah kondisi sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Pelalawan dalam mengimplentasikan program bantuan pupuk di Desa Bukit	Sapras (Sarana dan prasarana) Khusus untuk program ini ada tim verval yang terdiri dari beberapa orang dan untuk di desa itu ada pendamping desa. Jumlah pendamping desa itu berbeda ada yang 1 ada yang lebih tergantung jumlah kelompok tanah. Misalnya kalau di Desa Bukit Jaya ada 1 kalau di Desa Bukit Gajah ada dua. Jadi berbeda-beda jumlahnya.
			Verval (tim pendamping dan penyuluhan) Setiap satu desa rata-rata satu pendamping desatergantungan jumlah kelompok yang ada di desa itu juga jadi disesuaikan juga nanti
			Petugas Pendamping Desa Bukit Jaya Kalau untuk berapa orangnya aku kurang tau tapi yang pernah kami jumpai kayaknya 3 orang. Setiap kecamatan kayaknya punya penyuluh masing-masing
			Kepala Desa Bukit Jaya Kalau di bukit jaya cuma ada satu pendamping tapi kalau didesa lain mungkin bisa lebih
			Masyarakat penerima bantuan pupuk 1 Sepertinya Cuma satu ya mbak nabila saja yang kesana dan kesini tapi yang dari dinas cuma



No	Indikator	Pertanyaan	Hasil Wawancara
Hak cipta milik UIN Suska Riau		Jaya ?	pas awal-awal saja
			Masyarakat penerima bantuan pupuk 2 Cuma satu aja kayaknya mbak nabila saja nggak ada yang lain
			Masyarakat yang tidak menerima bantuan pupuk 1 Kayaknya memang tidak banyak timnya soalnya yang nampak cuma itu-itu aja
			Masyarakat yang tidak menerima bantuan pupuk 2 Kalau yang sering nampak cuma satu orang yang kelihatan tapi nggak tau juga totalnya berapa
		Bagaimanakah kondisi sumber daya anggaran yang dimiliki Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Pelalawan dalam mengimplentasikan program bantuan pupuk di Desa Bukit Jaya?	Sapras (Sarana dan prasarana) Anggaran itu ada tapi penggunaannya tetap bergantung pada data proposal dilapangan jadi besaran yang di dikeluarkan nanti tergantung pada proposal yang di ajukan dan sudah di seleksi di dinas
			Verval (tim pendamping dan penyuluhan) Ya disesuaikan dengan dana yang ada saja
			Petugas Pendamping Desa Bukit Jaya Kalau anggaran memang itu dari pemerintah ya nanti di sesuaikan dengan jumlah proposal yang masuk jadi nanti baru tau berapa dana yang akan diturunkan untuk dibelikan pupuk dan kebutuhan operasional lainnya.
			Kepala Desa Bukit Jaya Anggaran total berapa saya tidak atau tapi kalau pastinya program bantuan pupuk ini diambil dari anggaran pemerintah pastinya
			Masyarakat penerima bantuan pupuk 1 Ya program pemerintah jadi uangnya dari uang pemerintah jadi bukan dana pak sukri selaku bupati
			Masyarakat penerima bantuan pupuk 2 Ya kayanya dari anggaran pemerintahlah kan programnya dari pemerintah pusat ya katanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, p
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa



No	Indikator	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1. Hak cipta milik UIN Suska Riau	Bagaimanakah kondisi sumber daya peralatan yang dimiliki Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Pelalawan dalam mengimplentasikan program bantuan pupuk di Desa Bukit Jaya?		Masyarakat yang tidak menerima bantuan pupuk 1 Ya pasti adalah anggarannya kan program ini sebenarnya punya pemerintah kan jadi memang sudah ada di siapkan
			Masyarakat yang tidak menerima bantuan pupuk 2 Ya nggak tau tapi kayaknya memang dari anggaran pemerintah kan ini bagian dari pemerintah
			Sapras (Sarana dan prasarana) Tidak ada peralatan khusus karena kalau dinas sifatnya hanya mendata dan memverifikasi saja kalau peralatan khusus tidak ada. Kalaupun penyaluran ya itu di lakukan oleh pihak ketiga.
			Verval (tim pendamping dan penyuluhan) Tidak ada sarana dan prasarana khusus yang ada aplikasi untuk menentukan titik koordinat untuk setiap pendamping
			Petugas Pendamping Desa Bukit Jaya Kami cuman pakai hp untuk pendataan dan pengambilan titik koordinat di kebun
			Kepala Desa Bukit Jaya Peralatan khusus yang di sediakan ya tidak ada karena kan cuma mendata dan verifikasi apakah data yang diberikan benar atau tidak
			Masyarakat penerima bantuan pupuk 1 Sampai ke batas-batas lokasi lahan di sertifikat lebih ke dokumen saja
			Masyarakat penerima bantuan pupuk 2 Peralatan khusus ya ndak ada palingan pas ngukur-ngukur mereka bawa alat ukur sendiri ya
			Masyarakat yang tidak menerima bantuan pupuk 1 Rasanya tidak ada peralatan khusus yang di kasih atau di bawa paling ada liat pas ngukur-ngukur tanah
			Masyarakat yang tidak menerima bantuan pupuk 2 Nggak tau juga karena nggak pernah liat
	Bagaimanakah kondisi sumber	Sapras (Sarana dan prasarana) Kewenangan tetap dari Dinas tapi yang menyalurkan pupuk ada pihak ketiga yang kita bekerja	

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, p
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan buku, dan sebagainya.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

No	Indikator	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Hak cipta milik UIN Suska Riau	daya kewenangan yang dimiliki Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Pelalawan dalam mengimplentasikan program bantuan pupuk di Desa Bukit Jaya?	sama dengan mereka jadi tidak kami langsung. Kalau yang berwenang dan bertanggung jawab tetap kepala dinas perkebunan.
			Verval (tim pendamping dan penyuluhan) Kalau kewenangan ya tetap pada dinas karena dari pusat dinas perkebunan yang mengelola nanti turunannya baru ke pemerintah di bawah yang di dampingi oleh pendamping desa
			Petugas Pendamping Desa Bukit Jaya Kewenangan disbunnak ya yang kemarin aku bilang. Menurutku ya mereka itu sebagai pelaksana dan penanggungjawab
			Kepala Desa Bukit Jaya Kewenangan program ya oleh dinas perkebunan tapi kalau di lapangan ya kepala desa sebagai pemimpin di desa
			Masyarakat penerima bantuan pupuk 1 Kewenangan ya pemerintah yang di wakili pendamping sampai ke pengukuran ada tim dari dinas
			Masyarakat penerima bantuan pupuk 2 Ya yang berwenang ya Dinas Perkebunan kan karena memang dari awal mereka yang turun sosialisasi baru kesana kesininya mbak nabila sebagai pendampingnya
			Masyarakat yang tidak menerima bantuan pupuk 1 Ya tanggung jawab pemerintah kalau di desa ya kepala desa kan pak kades yang paling tinggi jabatannya
			Masyarakat yang tidak menerima bantuan pupuk 2 Pemerintahlah bisa dari dinas atau kepala desa juga bisa
3	Disposisi (sikap)	Bagaimanakah sikap pegawai Dinas Perkebunan Dan	Sapras (Sarana dan prasarana) Sikapnya ya menjalankan sesuai sop dan aturan yang ada karena ini sudah di SK kan programnya jadi memang harus di laksanakan jadi kami sebagai tim pelaksana program berusaha selancar mungkin



No	Indikator	Pertanyaan	Hasil Wawancara
Hak cipta milik UIN Suska Riau		Pernakan Kabupaten Pelalawan dalam mengimplentasikan program bantuan pupuk oleh kepada petani sawit di Desa Bukit Jaya ?	Verval (tim pendamping dan penyuluhan) Berusaha bekerja dengan semaksimal mungkin dan bisa membagikan pupuk dengan lancar dan merata
			Petugas Pendamping Desa Bukit Jaya Ya harus profesional karena kan memang ini kerja kami ya dan kami mengusahakan penyaluran pupuk ini bisa lancar dan tepat sasaran
			Kepala Desa Bukit Jaya Karena ini program dinas langsung dari atas jadi memang harus dilaksanakan tapi dengan verifikasi dan pendataan yang lengkap dan ketat agar memang tepat sasaran.
			Masyarakat penerima bantuan pupuk 1 Ya baik dan berkomunikasi dengan baik dan membantu petani menyeleksi dokumen yang dibutuhkan apa-apa saja
			Masyarakat penerima bantuan pupuk 2 Ya ramah dan sangat membantu menjelaskan kalau ada masyarakat yang tidak tau atau tidak mengerti
			Masyarakat yang tidak menerima bantuan pupuk 1 Nampaknya cukup ramah tapi memang kurnag tau pasti karena saya tidak ikut program itu
			Masyarakat yang tidak menerima bantuan pupuk 2 Ya lumayan ramah tapi nampaknya memang tidak banyak petugasnya
		Apakah ada insentif kepada pegawai atau masyarakat yang di berikan Dinas Perkebunan Dan	Sapras (Sarana dan prasarana) Kalau gaji tidak ada tapi mereka gaji namanya yang di berikan oleh pemerintah daerah yang langsung masuk ke anggaran. Jadi bukan honor sistemnya tapi langsung sistem gaji dan itu juga tercantum di dalam proposal yang di ajukan.
			Verval (tim pendamping dan penyuluhan) Tidak ada insentif khusus ya sesuai dengan gaji/ honor yang sudah di tentukan saja
			Petugas Pendamping Desa Bukit Jaya Insentif ada, untuk pengambilan titik koordinat dibayar 10rb/petani. Dibayarkan nanti ketika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, p
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan buku, dan sebagainya.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

No	Indikator	Pertanyaan	Hasil Wawancara
4	Hak cipta milik UIN Suska Riau	Pernakan Kabupaten Pelalawan dalam mengimplentasikan program bantuan pupuk oleh kepada petani sawit di Desa Bukit Jaya ?	bantuan sudah turun. Insentif untuk masyarakat ga ada
			Kepala Desa Bukit Jaya Ndak ada karena memang tugasnya jadi memang tidak ada insentif khusus gitu nggak ada karena memang sudah tugasnya. Jadi mungkin sistem gaji seperti biasa saja seperti nya.
			Masyarakat penerima bantuan pupuk 1 Kalau insentif uang ke petani ya ndak ada
			Masyarakat penerima bantuan pupuk 2 Kalau kami kan cuma dapat pupuk kalau uang ya belum ada dapat kami
			Masyarakat yang tidak menerima bantuan pupuk 1 Ya nggak tau tapi harusnya ada ya karena kan ini termasuk pekerjaan bagi petugasnya
			Masyarakat yang tidak menerima bantuan pupuk 2 Nggak tau kalau masalah uang-uang
	Stuktur birokrasi	Bagaimanakah kondisi birokrasi yang diciptakan Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Pelalawan dalam mengimplentasikan program bantuan pupuk oleh kepada	Sapras (Sarana dan prasarana) Dimulai dari pendataan petani dulu baru diajukan jumlah pupuk yang di butuhkan di lapangan jadi di awali dari data petani dulu baru dilakukan pengadaan pupuk.
			Verval (tim pendamping dan penyuluhan) Ada rentang antara dari pengumpulan proposal ada dua bulan nanti di tahap verifikasi ada satu bulan juga jadi memang jaraknya cukup jauh
			Petugas Pendamping Desa Bukit Jaya Diawali dari sosialisasi terus dilanjutkan dengan pengumpulan data dan verifikasi data yang nantinya di rapatkan untuk di setuju dari dinas baru dilakukan penyaluran dari pihak ketiganya nanti di lapangan di wakili sama aku dan ketua kelompok tani khusus penerima bantuan pupuk
			Kepala Desa Bukit Jaya Ada alurnya mulai dari pendataan petani nanti di seleksi mana yang bisa masuk mana yang tidak nanti di naikan ke dinas nanti di dinas di verifikasi lagi datanya baru tau apakah lolos atau tidak kalau sudah lolos nanti pupuk di bagikan ke kelompok tani yang di wakilin oleh



No	Indikator	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1. Hak cipta milik UIN Suska Riau	petani sawit di Desa Bukit Jaya ?		ketua kelompok yang nanti mengkoordinir ke anggota petani lain
			Masyarakat penerima bantuan pupuk 1 Ya mulai dari sosialisasi ke petani terus disuruh melengkapi dokumen seperti KTP, KK dan surat tanah untuk mengetahui posisi lahan kita
			Masyarakat penerima bantuan pupuk 2 Sebenarnya nggak ribet kalau kita tau alurnya dan kalau memang tidak mengerti ya kita tinggal tanya ke pendamping kita saja
			Masyarakat yang tidak menerima bantuan pupuk 1 Prosesnya banyak harus siapkan ini dan itu ada juga seleksi ini itu jadi nggak bisa langsung di acc
			Masyarakat yang tidak menerima bantuan pupuk 2 Sepertinya ribet sama banyak syaratnya belum lagi ada survey juga kan ngukur kebun juga
	Apa yang menjadi kepentingan Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Pelalawan dalam mengimplentasikan program bantuan pupuk oleh kepada petani sawit di		Sapras (Sarana dan prasarana) Kepentingan sebagai penyampaian program pemerintah dengan tujuan memberikan stimulus kepada petani untuk mendongkrak hasil tani mereka jadi bukan di bagi-bagi kesemua masyarakat tapi khusus petani yang sudah terdaftar
			Verval (tim pendamping dan penyuluhan) Sebagai tugas melaksanakan program dari pemerintah. Dan yang bertanggung jawab atas program ini ya kepala dinas perkebunan yang nanti di lanjutkan kepala kepala desa sebagai kepala pemerintahan di wilayah tersebut
			Petugas Pendamping Desa Bukit Jaya Ya sebagai pelaksana program dari pemerintah dan sebagai pekerjaan juga
			Kepala Desa Bukit Jaya Kepentingan kami dari desa ya memastikan program ini lancar tidak ada kendala di lapangan dan membantu verifikasi data dengan data desa yang ada
			Masyarakat penerima bantuan pupuk 1 Kan ini program pemerintah jadi memang pemerintah yang menyampaikan ke masyarakat dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan buku, dan sebagainya.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan buku, dan sebagainya.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

No	Indikator	Pertanyaan	Hasil Wawancara
Hak cipta milik UIN Suska Riau		Desa Bukit Jaya ?	memilih masyarakat yang bisa dan berhak
			Masyarakat penerima bantuan pupuk 2 Kan ini sebenarnya program pemerintah jadi ya pemerintah juga yang menyampaikan dan menyalurkannya ke masyarakat
			Masyarakat yang tidak menerima bantuan pupuk 1 Ya kan program pemerintah jadi memang tugasnya dari pemerintah untuk di sampaikan ke Masyarakat
			Masyarakat yang tidak menerima bantuan pupuk 2 Harusnya bisa di ratakan program soalnya tidak semua masyarakat yang tau dan pasti ingin ikutkan
	Apakah yang menjadi tujuan Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Pelalawan dalam mengimplentasikan program bantuan pupuk oleh kepada petani sawit di Desa Bukit Jaya ?		Sapras (Sarana dan prasarana) Ini kan amanah dari program bupati jadi bupati itu ingin masyarakat itu mempunyai hasil tani yang melimpah dan berharap hasil tani masyarakat ini tidak terlalu jauh dari hasil tani yang petani bekerja sama dengan perusahaan
			Verval (tim pendamping dan penyuluhan) Program bantuan pupuk ini untuk memajukan dan membantu petani yang lahan sawitnya dengan jenis sawit pekarangan atau swadaya jadi tidak petani yang sudah bekerja sama dengan PT. Jadi ini petani sawit yang mandiri ya tidak terikat.
			Petugas Pendamping Desa Bukit Jaya Ya untuk membantu petani swadaya supaya bisa berkembang meskipun tidak bekerja sama dengan perusahaan
			Kepala Desa Bukit Jaya Ya untuk membantu petani yang swadaya ya yang sendiri supaya tetap menghasilkan hasil kebun yang lebih baik lagi dan memberikan semangat terhadap petani
			Masyarakat penerima bantuan pupuk 1 Untuk membantu petani menjadi mensejahterakan petani dari hasil tani dan memberi semangat kepada petani yang mandiri



No	Indikator	Pertanyaan	Hasil Wawancara
Hak cipta milik UIN Suska Riau			Masyarakat penerima bantuan pupuk 2 Ya untuk menambah semangat ke petani sehingga bisa mendapatkan hasil lebih banyak lagi
			Masyarakat yang tidak menerima bantuan pupuk 1 Ya semoga masyarakat swadaya bisa lebih sejahtera
			Masyarakat yang tidak menerima bantuan pupuk 2 Masyarakat masih banyak yang belum tau jadi harusnya bisa di meratakan lagi programnya
		Bagaimanakah bentuk fungsi terhadap lingkungan dalam kaitannya dengan program bantuan pupuk oleh kepada petani sawit di Desa Bukit Jaya ?	Sapras (Sarana dan prasarana) Pemerintah ini membantu masyarakat yang sawitnya swadaya atau lahan sendiri yang tidak bekerja sama dengan siapa-siapa tapi bisa menghasilkan hasil tani yang maksimal tapi ini tidak menanggung kebutuhan semua pupuk petani jadi misalnya petani butuh 10 ton tapi yang di bantu pemerintah hanya 2 ton karena ini lebih ke stimulasi kepada petani untuk memberi semangat dan merasa di perhatikan oleh pemerintah
			Verval (tim pendamping dan penyuluhan) Fungsinya untuk memberikan hasil yang maksimal kepada petani dari segi hasil tani jadi lebih ke lingkungan segi ekonomi bagi keluarganya.
			Petugas Pendamping Desa Bukit Jaya Fungsi sebagai pelaksana program pemerintah dan sebagai pelayan masyarakat
			Kepala Desa Bukit Jaya Memastikan data memang benar dan melakukan kunjungan ke lokasi dan mambantu verifikasi data dan koordinat
			Masyarakat penerima bantuan pupuk 1 Ya supaya masyarakat disini bisa lebih berkembang lagi dari segi ekonomi
			Masyarakat penerima bantuan pupuk 2 Menjadikan masyarakat ini bisa tetap berkembang walaupun ndak ada kerjasama dengan PT
			Masyarakat yang tidak menerima bantuan pupuk 1 Kurang tau juga ya kalau itu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, p
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa



No	Indikator	Pertanyaan	Hasil Wawancara
Hak cipta milik UIN Suska Riau	Bagaimanakah cara Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Pelalawan mengendalikan program pupuk agar berjalan lancar di Desa Bukit Jaya ?		Masyarakat yang tidak menerima bantuan pupuk 2 Harusnya bisa diperbaiki lagi sosialisasinya
			Sapras (Sarana dan prasarana) Kami melakukan verifikasi dan memastikan lahan itu ada dengan memastikan titik koordinatnya dan syarat-syaratnya banyak dan harus lengkap dan nanti di koordinasi ke kelompok yang mengelola dan menyalurkan ke petani
			Verval (tim pendamping dan penyuluhan) Dari pendataan yang nanti naik ke tingkat proposal dan nanti di bagikan sesuai nama yang ada di proposal
			Petugas Pendamping Desa Bukit Jaya Dengan data yang ada karena kan data ini sudah di verifikasi berkali-kali sampai ke dinas jadi dengan data itu semua bisa di kendalikan dan tidak ada yang tidak tepat sasaran
			Kepala Desa Bukit Jaya Setau saya dikendalikan atau di salurkan oleh pihak ketiga yang sesuai dengan data yang ada dan itu di foto jadi jelas data penyalurannya
			Masyarakat penerima bantuan pupuk 1 Kan di kelola sama kelompok tani jadi dibuat kelompok tani khusus penerima bantuan jadi bisa tepat sasaran dan tidak ada penyelewengan pupuk disini aman terkendali
			Masyarakat penerima bantuan pupuk 2 Kan ada pihak ketiga yang sediakan pupuk tapi kan nanti sesuai dengan petani yang sudah di data
			Masyarakat yang tidak menerima bantuan pupuk 1 Masih kurang bisa karena banyak masyarakat ingin ikut tapi nggak bisa karena prosesnya Panjang
			Masyarakat yang tidak menerima bantuan pupuk 2 Susah juga karena tidak merata jadi kurang bisa di kendalikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, p
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

Lampiran 3

Dokumentasi Penelitian

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau		
	Roni Yulianto Kabid Sarana dan prasarana Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Pelalawan	Nico Tri Cahyo Tim Verval / pegawai Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Pelalawan
		
	Kepala Desa Bukit Jaya	Nabila Kamalia Pendamping Siaga Desa Bukit Jaya
		
	Sukpto Petani Yang Menerima	Sri Yuliati Petani Menerima

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 4

Surat-Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrandt No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonso@uin-suska.ac.id

Nomor : B-7397/Un.04/F.VII/PP.00.9/11/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Mohon Izin Riset

12 November 2025

Yth. Kepala Kantor Desa Bukit Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan
Jl. Poros Air Emas, Bukit Jaya
Kec. Ukui, Kabupaten Pelalawan
Riau 28382

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Citra Amalia Syahidah
NIM. : 12270521767
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud melakukan Riset di tempat Bapak/Ibu dengan judul: **"Implementasi Program Bantuan Pupuk Oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan Kepada Petani Sawit di Desa Bukit Jaya"**. Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Riset dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kuasa Dekan,



Dr. Khairil Henry, S.E., M.Si., Ak
NIP. 197511292008011009

UIN SUSKA RIAU



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : XlaG9r4A

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-7108/Un.04/F.VII/PP.00.9/11/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Izin Riset**

06 November 2025

Yth. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan
Komplek Perkantoran Bhakti, Pangkalan Kerinci Barat
Pangkalan Kerinci, Pangkalan Kerinci Barat
Kec. Pelalawan, Kabupaten Pelalawan
Riau 28654

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Citra Amalia Syahidah
NIM. : 12270521767
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud melakukan **Riset** di tempat Bapak/Ibu dengan judul: **"Implementasi Program Bantuan Pupuk Oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan Kepada Petani Sawit di Desa Bukit Jaya"**. Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin **Riset** dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kuasa Dekan,



Dr.Nurlasera,S.E.,M.Si
NIP.1973060120071102003

UIN SUSKA RIAU



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : VSTVqTER

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

KOMPLEK PERKANTORAN BHAKTI PRAJA – PANGKALAN KERINCI
TELP/FAX. (0761) 95252 KODE POS 28300

Nomor : 800.1/DISBUNNAK/2026/1/30
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Balasan Surat Izin Riset

Pangkalan Kerinci, 27 Januari 2026

Kepada :

YTH. Kuasa Dekan UIN Suska Riau

di-

Tempat

Dengan ini,

Menindak lanjuti surat dari **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL** Nomor : B-7108/Un.04/F.VII/PP.00.9/11/2025 berkenaan dengan Permohonan Izin Riset, maka dengan ini kami memberikan ijin untuk melakukan Riset dengan judul : **"Implementasi Program Bantuan Pupuk Oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan Kepada Petani Sawit di Desa Bukit Jaya"** di wilayah kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan Kepada :

Nama : Citra Amalia Syahidah
NIM : 12270521767
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN PELALAWAN



AKTHAR, S.E
Pembina TK I/IV.b
NIP. 19750101 200112 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
KECAMATAN UKUI
DESA BUKITJAYA**

JL. Poros Desa Bukit Jaya No.01 Telepon.....Faksimile.....Kode Pos 28388
Email : bukitjaya87@gmail.com - Website : Bukitjaya88.com

**SURAT REKOMENDASI
NOMOR : 500.5.7.15/1/BJ/2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. SUWITO ADMADI**
Jabatan : **Kepala Desa Bukit Jaya**

Berdasarkan surat permohonan izin riset Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : B-7397/Un.04/F.VII/PP.00.9/11/2025 tanggal 12 November 2025, sebagai kelengkapan data penelitian (Penulisan Skripsi) Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : **CITRA AMALIA SYAHIDAH**
NIM : **12270521767**
Program Studi : **Administrasi Negara**
Jenjang Pendidikan : **S1**
Semester : **VII (Tujuh)**

Untuk melakukan penelitian di Pemerintah Desa Bukit Jaya sebagai objek Penelitian Penulisan Skripsi.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukit Jaya, 20 Januari 2026

.....Kepala Desa Bukit Jaya



H. SUWITO ADMADI

BIODATA PENULIS



Citra Amalia Syahidah. Lahir di Desa Kampung Baru pada tanggal 5 Oktober 2004. Anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Susanto dan Ibu Siti Nurhasanah. Pada tahun 2010 penulis menyelesaikan pendidikan taman kanak-kanak (TK) Tunas Putra Kampung Baru, pada tahun 2016 penulis menyelesaikan pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Al-Islamiyah Kampung Baru, pada tahun 2019 penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Ukui. Pada tahun 2022 penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Jurusan Administrasi Negara jenjang strata 1 (S1). Pada tahun 2025 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Camat Ukui Kecamatan Ukui, kemudian pada tahun yang sama penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Penulis melakukan penelitian di Desa Bukit Jaya Kecamatan Ukui dengan judul **"Implementasi Program Bantuan Pupuk Oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan Kepada Petani Sawit di Desa Bukit Jaya Kecamatan Ukui"**. Dibawah bimbingan Bapak Candra Jon Asmara, S.Sos.,M.Si. Penulis mengikuti ujian munaqasah pada hari Kamis, 23 April 2026 kemudian dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.